



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI X DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d 14.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI,
Gd. Nusantara I Lt. 1
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Ketua Rapat : Dr. Dede Yusuf M E, S.T, M.I.Pol (Wakil Ketua
/F-P.Demokrat)
Acara : Membahas RKA-K/L & RKP-K/L Tahun 2025
Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP, M.H.
Kabag Set. Komisi X DPR RI
Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**
24 orang anggota hadir dari 55 orang
anggota, terdiri dari:

PIMPINAN:

1. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S, M.M. (Wakil Ketua / F-PDI Perjuangan)
2. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (Wakil Ketua / F-Golkar)
3. Dr. Dede Yusuf M E, S.T, M.I.Pol. (Wakil Ketua / F-P.Demokrat)
4. Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M. (Wakil Ketua (F-PKS)

FRAKSI PDI PERJUANGAN (F-PDIP):

1. dr. Sofyan Tan
2. Putra Nababan
3. Rano Karno, S.IP
4. Dr. Andreas Hugo Pareira

5. Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-GOLKAR):

1. Ferdiansyah, S.E.,M.M.
2. H. Muhammad Nur Purnamasidi

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA):

1. Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin
2. Ir. H. Nuroji
3. Elnino M. Husein Mohi, S.T, M.Si.
4. Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si.

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM):

1. Ratih Megasari Singkaru, M.Si.
2. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E, M.MTr.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB):

1. Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H, M.H.
2. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-DEMOKRAT):

1. Anita Jacoba Gah, S.E.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS):

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T.
2. Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M, M.Ed.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

1. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.
2. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

B. PEMERINTAH/TAMU UNDANGAN

1. Nadiem Anwar Makarim, B.A, M.B.A (Mendikbudristek RI)
2. Ir. Suharti, M.A, Ph.D (Sekretaris Jenderal)
3. Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H, S.E, M.H (Inspektur Jenderal)

4. Dr. Iwan Syahril, Ph. D (Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen)
5. Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc (Dirjen Pendidikan Vokasi)
6. Prof. Dr.rer.nat. Abdul Hariss, M.Sc (Dirjen Diktiristek)
7. Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. (Dirjen GTK)
8. Hilmar Farid, Ph.D (Dirjen Kebudayaan)
9. Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil, Ph.D. (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan)
10. Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A, Ph.D. (Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Berhubung tadinya pimpinan adalah Ibu Agustina tetapi beliau ada kegiatan yang rupanya belum bisa ditinggalkan, sehingga ditugaskan saya sebagai Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan untuk memimpin rapat ini. Untuk itu saya izin bertanya kepada kawan-kawan, apakah bisa kita mulai rapat? Bisa, ya?

Baik.

**Yang kami hormati Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi,
Saudara Nadiem Anwar Makarim,
Beserta seluruh jajaran Ibu Sekjen dan juga jajaran Eselon I,
Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir dalam rapat kerja Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sekedar melaporkan, hari ini sudah hadir sekitar 18 orang dari 7 fraksi, sehingga rapat bisa kita nyatakan quorum sesuai dengan tata tertib, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Agenda rapat kerja hari ini adalah membahas RKA dan RKP Kemendikbudristek RI Tahun Anggaran 2025.

Jadi kalau kita berbicara 2025, praktis berfungsi baru di tahun 2025 di era pemerintahan baru. Itu sebabnya, agenda ini juga sangat *crucial*, karena tentu ada pergantian pemerintahan, transisi pemerintahan dan visi daripada pemerintahan baru tentunya akan tertuang di sini. Oleh karena itu, saya sarankan agar kita benar-benar menyimak dan melihat bagaimana perubahan program Kementerian Pendidikan.

Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf A Undang-Undang No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tugas Komisi di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang termasuk dalam lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Atas dasar pasal yang telah kami bacakan, maka Raker ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang tersebut.

Rapat kerja hari ini merupakan pembahasan pendahuluan RKA-K/L dan RKP-K/L Kemendikbudristek RI Tahun Anggaran 2025. Pembahasan lebih intens akan kita laksanakan setelah Presiden Republik Indonesia menyampaikan nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025 pada sidang Paripurna tanggal 16 Agustus 2024 di IKN, katanya. Kalau saya tidak salah, 16 atau 17 Agustus ya, tapi kita belum tahu ini.

Jadi oleh karena itu, apa pun yang dibicarakan hari ini masih bisa berubah dalam konteks sebelum diputuskan pada saat Nota Keuangan 16 Agustus. Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 kepada DPR RI dan memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2025.

Dokumen ini disusun di tengah belum optimalnya pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi serta munculnya berbagai risiko dan ketidakpastian akibat dinamika geopolitik, kinerja perdagangan dan investasi global, serta gejolak di pasar keuangan global.

Selain itu, kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 juga disusun pada masa transisi pemerintahan. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Pada dasarnya kita harus mulai berbicara 2045, yaitu disebut sebagai generasi emas. 2025 berarti hanya tersisa 20 tahun, dan harus ada perubahan yang signifikan menuju kepada generasi emas tersebut.

Itu sebabnya, sekali lagi, Komisi X bersama pemerintah dahulu kita bersepakat untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia. Dan kekuatan SDM bukan lagi hanya sebagai *supporting*, tetapi benar-benar sebagai isu yang sangat prioritas. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Menteri Pendidikan terkait program-program Kementerian Pendidikan di mana, ini tolong didengarkan baik-baik, di mana kami mendengar ada tambahan program yang ini merupakan bagian daripada transisi pemerintahan baru.

Di mana salah satunya, kalau saya tidak salah, ada mengenai makan gratis. Lalu kemudian juga, yang saat ini kita juga sedang ramai-ramai berbicara tentang bagaimana pembiayaan pendidikan ini harusnya ada dukungan pemerintah terhadap penambahan-penambahan beasiswa ataupun bagaimana menekan biaya kemahalan daripada pendidikan.

Apalagi, kemarin kita sudah membahas mengenai mandatori anggaran pendidikan 20%, di mana anggaran 20% ini rasanya Kemendikbud tidak boleh hanya mendapatkan 14 atau 15% saja daripada yang 20%. Karena ini akan berdampak kepada biaya-biaya pendidikan yang semakin mahal dan naik.

Untuk itu izinkan, teman-teman, nanti kita dengarkan terlebih dahulu paparan. Setelah itu silakan jika anggota ingin memberikan tambahan, tapi kami memberi ruang untuk kita melakukan diskusi yang sifatnya lobi-lobi terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap anggaran yang ada.

Apakah bisa disetujui demikian?

F-GOLKAR (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI):

Pimpinan sebentar, saya dulu.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Silakan, Pak.

F-GOLKAR (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya, terima kasih.

Jadi, saya sepakat kita mendengarkan program. Tapi bagi saya, kita perlu memperjelas program yang sedang *on going*. Ya, karena dampaknya terasa. Jadi saya mau tanya, kita bicarakan di rapat tertutup atau terbuka? Saya mohon persetujuan Pimpinan. Karena ini penting, apalagi menyangkut sekarang merosotnya anggaran Kemendikbud. Mau membantu kok, kita mau membantu menaikkan dengan rasionalisasi yang kuat.

Tapi kalau kemudian program yang *on going*, yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah wajib 13 tahun, kita *nggak* bisa membiarkan ini terjadi. Masa dari seribu orang, kemudian sekarang tinggal 12 orang yang dapat program itu? Kan *nggak* bisa. Jadi mohon maaf kalau memang kita belum selesaikan urusan yang *on going*, saya keluar dari forum ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, terima kasih.

Sebagaimana kami dapat dari data di sini, RAPBN Tahun Anggaran 2025 Kemendikbudristek sebesar 83.187.821.000.000 sekian. Berarti terjadi penurunan dari 97.000.000.000.000 menjadi 83.000.000.000.000. Harapan kita sebetulnya justru nambah, tapi yang ternyata yang terjadi ada penurunan.

Nah Bapak dan Ibu, saya sepakat apa yang dikatakan Pak Nur tadi, yang *on going* pun sekarang masih belum selesai. Sekali lagi, saya tawarkan kepada kawan-kawan semua, apakah kita dengarkan terlebih dahulu, Pagu Indikatif sebagaimana yang tertera di sini. Kita lihat ya dari 2021, Pagu Indikatif adalah 75.000.000.000.000, lalu 2022 Pagu Indikatif 73.000.000.000.000, Pagu Indikatif 2023 80.000.000.000.000, Pagu Indikatif 2024 81.000.000.000.000, lalu ada penambahan menjadi 98.000.000.000.000 pada saat tahun 2024. Sekarang kita kembali lagi ke 83.000.000.000.000, berarti cukup jauh penurunannya.

Oleh karena itu, penjelasan hari ini yang pertama adalah adalah Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Kemendikbudristek RI 2025 dengan argumentasinya berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif serta capaian yang bertujuan menyelesaikan permasalahan pendidikan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Yang kedua, skema anggaran fungsi pendidikan K/L terkait RKP dan RKA K/L tahun anggaran 2025. Dan yang ketiga, dasar penentuan target dan sasaran program-program prioritas tahun anggaran 2025 serta strategi realisasinya.

Jadi, kita perlu melihat kira-kira dalam proses transisi ini program apa yang akan tetap menjadi unggulan dan program apa yang mungkin tidak menjadi unggulan kembali. Karena apa yang sudah dilakukan dengan sekolah merdeka, merdeka belajar, saya pikir ini sudah *on progress*. *Nah*, apakah ada transisi yang mendasar terkait dengan perkembangan ini. Setelah itu, kita juga akan fokus terhadap program yang *on going*, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Nur Purnamasidi.

Jadi, bagaimana kawan-kawan, kita dengarkan terlebih dahulu baru nanti kita skors untuk melakukan pendalaman?

Silakan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH., S.Si., M.Psi.T.):

Daftar Ledia.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Pak Djohar.

Ibu Ledia, silakan.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI., M.Si.):

Daftar Dewi Coryati.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH., S.Si., M.Psi.T.):

Ya, baik Pimpinan, terima kasih.

Sebagaimana tadi sudah kita juga ketahui, bahwa ketika kita bicara soal apa sih nanti yang akan diambil menjadi fokus pada program 2025. Tentu basisnya adalah di evaluasi, evaluasi pada program-program yang *on going*. Tidak bisa kita kemudian tiba-tiba mengambil sebuah langkah untuk ke depan tanpa kita melakukan evaluasi.

Karenanya menjadi bagian yang penting, menurut saya. Kita bincangkan justru terlebih dahulu persoalan-persoalan yang belum diselesaikan, padahal itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar. Amanat dari Undang-Undang Dasar ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu baru kemudian kita bicara ke depannya, bahwa ini nanti transisi itu nanti bisa saja Pak Ketua, diubah saja sama Presiden yang nanti terpilih, itu mungkin saja.

Tetapi, tentu kita perlu melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah terjadi, program-program yang ada yang ternyata memang di lapangannya menimbulkan gejolak yang luar biasa.

Itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, terima kasih.

Termasuk juga kita ini baru dengar-dengar informasi, apa benar Kemendikbudristekdikti nanti akan dibelah menjadi Kemendikbud dan Kemendikti.

Nah kita juga belum tahu juga ini.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Bisa tiga, kebudayaan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Atau ada lagi kebudayaan. Makanya, ini semua anggarannya diputuskan di sini.

Baik, ada masukan lagi Pak Djohar, silakan.

F-GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSNI):

Baik. Terima kasih.

Pimpinan, seluruh Anggota dan Pak Menteri.

Banyak hal-hal yang kami mau dibicarakan, tapi langsung kita ini langsung berhadapan dengan rapat kerja. Saya pikir kita bisa minta waktu berapa menit Pimpinan dengan Saudara Menteri, bisa diskusi dulu, bicarakan hal-hal apa yang penting.

Jangan langsung kita di sini kita belum tahu apa masalah. Dan kita tahu, pemerintah yang akan datang inilah yang akan menjalankan anggaran ini ke depan. Jadi, program pemerintah yang baru nanti kan harus masuk, kan itu seperti itu. Jadi barangkali ya bisa jadi skor berapa menit, ya pimpinan dengan Saudara Menteri bisa diskusi dulu sebelum kita lanjutkan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Terima kasih Pak.

Ibu Dewi.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI., M.Si.):

Ya, untuk bisa fokus dalam membicarakan membahas tentang program yang akan datang, seperti tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita, sebaiknya kita menyelesaikan dulu yang *on going*.

Terima kasih, Pimpinan, sehingga lobi pimpinan dan Kapoksi dibutuhkan untuk menyelesaikan ini, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, ada lagi?

Silakan, Pak Putra.

Ada opsi di sini kawan-kawan, oh ada Pak Nino. Pak Nino ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Supaya *nggak* ini dia, supaya tersalurkan. Oh, entar? Baik.

Teman-teman, saya kasih opsi. Kita dengarkan terlebih dahulu gambaran rencana kerja Kemendikbud. Setelah itu kita akan *break* untuk kita melakukan skors bersama terkait dengan program-program *on going* ataupun rencana-rencana kerja.

Bagaimana, setuju?

F-GOLKAR (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI):

Pimpinan, mohon maaf.

Kita ini mau membangun gedung, kita *nggak* tahu yang rusak yang mana. Kita ngomong dulu ini yang rusak, makanya itu nanti kita cocokkan programnya sudah benar atau *nggak* yang baru itu loh, jangan dibalik.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, tetapi kan kita juga mesti tahu kira-kira mau dibangun apa di atas yang rusak, gitu kira-kira. Jadi, saya tawarkan terlebih dahulu kita dengarkan setelah itu kita skors untuk melakukan pendalaman.

Bagaimana kawan-kawan, bisa demikian?

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Skors dulu saja, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, gimana kalau mau di skor dulu kita skor dulu.

Pak Rano? Baik.

Rupanya kita kedatangan ada anggota baru ini Pak ya, anggota baru.

Oh, baik.

Selamat datang, ini anggota baru kita ini dari Gerindra ya dengan nama Pak Yan Permenas Mandenas, untuk sementara menggantikan Pak Sodik ya, baik. Selamat datang, Pak Yan. Oh, Manajer PS Biak? Baik.

Mas Menteri yang kami hormati, saya pikir kawan-kawan hari ini ingin melakukan sebuah skors dulu untuk melakukan pendalaman terhadap program *on going*. Untuk itu izinkan kita skors rapat selama 10 menit kita melakukan diskusi dulu. Setuju? Setuju teman-teman?

Baik, rapat kita skors selama 10 menit sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Terima kasih.

(RAPAT DISKORS PUKUL 10.40 WIB)

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.34 WIB)

**Bapak, Ibu,
Kawan anggota yang hadir,**

Mungkin sebagian tadi masih ada yang sholat dan lain-lain. Saya akan meneruskan rapat ini dengan memberikan kesempatan Menteri Pendidikan menyampaikan paparan terhadap program-program 2025.

Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan.

MENDIKBUDRISTEK (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.B., M.B.A.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada pimpinan dan Anggota Komisi X untuk kesempatan memaparkan sedikit mengenai capaian dan juga penjelasan anggaran Kemendikbudristek TA 2025. Kalau kita bisa langsung saja ke halaman kedua.

Jadi, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, pagu indikatif Kemendikbud seperti yang tadi sudah disebut sebesar Rp83,19 triliun. *Nah*, sudah dibahas trilateral dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas dan pada pagu indikatif ini ada kenaikan sebesar 1,4 triliun dibandingkan 2024.

Tapi namun, mohon dicatat bahwa ini belum bisa mengoptimalkan semua kebutuhan kita, termasuk dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029. *Nah*, selain belanja Kemendikbudristek, ditetapkan alokasi anggaran DAK fisik sebesar 15,3 triliun dan DAK non-fisik 127,98 triliun.

Izinkan saya sedikit menjelaskan kisi-kisi besar capaian di tahun 2023.

Tentunya digitalisasi pendidikan dan berbagai macam aplikasi yang sudah diciptakan punya dampak yang sangat besar. Jutaan guru sudah menggunakan PMM dan juga lebih dari 1,3 juta perangkat TIK telah terdistribusi. Ini di luar aplikasi-aplikasi gratis yang diberikan kepada sekolah, kepala sekolah dan guru.

Berikutnya, dalam aspek pembiayaan pendidikan, tentunya angka yang cukup besar adalah jumlah penerima PIP di tahun 2023 yang di atas 18.000.000 dan juga tentunya hampir 1.000.000 mahasiswa yang mendapat bantuan KIP kuliah di tahun 2023. Dari aspek guru, tentunya pencapaian yang sangat membanggakan adalah 774.000 lebih guru honorer lulus seleksi guru ASN P3K dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, beserta berbagai macam partisipasi dalam pelatihan dan hampir 100.000 guru penggerak telah mengikuti pelatihan.

Berikutnya, juga 937.000, hampir 1.000.000 mahasiswa telah mengikuti program studi di luar kampus dari tahun 2020 sampai 2023 dan dana padanan yang telah dicapai melalui *matching fund* ini sudah melewati 1,6 triliun. Dari aspek vokasi pun, SMK Pusat Keunggulan sudah hampir 2.000 SMK Pusat Keunggulan yang terbentuk dan banyak sekali siswa yang menerima manfaat dari program ini.

Sekolah Penggerak, seperti yang kita tahu, salah satu program prioritas kita, ada 14.239 sekolah yang berpartisipasi pada sekolah penggerak sampai dengan tahun 2023. Ini adalah program *multi-year*, jadi akan terus berlanjut. Dan kita melihat sini juga kurikulum merdeka, salah satu kebijakan terpenting kita, sudah 309.000 lebih sekolah terdaftar mengimplementasi kurikulum baru ini dan 6.200 sekolah dari daerah tertinggal.

Berikutnya, dan tentunya berbagai macam capaian kinerja, baik dari aspek literasi, jutaan, 16.000.000 lebih eksemplar buku terdistribusi di daerah, terutama di daerah-daerah 3T. Dengan salah satu program literasi terbesar kita yang pernah diluncurkan Kemendikbudristek. Dan tentunya juga berbagai aspek kebijakan untuk melestarikan bahasa daerah yang sudah tersebar di lebih dari 26 provinsi di Indonesia.

Dan tentunya dalam aspek literasi terbesar, Internasionalisasi Bahasa Indonesia dan pemajuan kebudayaan juga banyak sekali pencapaian yang cukup membanggakan dan tentunya juga pembentukan BLU museum dan kebudayaan ini akan mengakselerasi pelestarian cagar budaya kita.

Untuk selanjutnya, saya ingin persilakan Bu Sekjen untuk meneruskan.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A, Ph.D.):

Terima kasih, Pak Menteri.

Izin, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota, untuk saya melanjutkan paparan Pak Menteri.

Berikutnya adalah terkait dengan berbagai cakup capaian program prioritas yang mendukung ketercapaian sasaran pada tataran nasional, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya akses layanan pendidikan. Yaitu angka kesiapan sekolah yang meningkat, angka partisipasi sekolah penduduk usia dari 7-12 sampai juga dengan yang usia 16-18, begitu juga dengan angka partisipasi kasar jenjang menengah dan pendidikan tinggi.

Kemudian terjadi juga peningkatan proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen nasional, baik itu untuk literasi maupun numerasi. Kemudian diketahui juga terjadi peningkatan indeks kemahiran berbahasa Indonesia yang menunjukkan peningkatan kemahiran berbahasa bagi penutur Bahasa Indonesia.

Dalam mendukung tercapainya prioritas nasional, Kemendikbudristek juga menjaga komitmen untuk melaksanakan anggaran secara akuntabel dan berkualitas. Hal ini antara lain, halaman berikutnya, ditunjukkan dengan nilai kinerja anggaran tahun 2023 yang masuk kategori sangat baik dengan nilai 95,59% untuk angka sementara karena belum keluar angkanya.

Aspek kebermanfaatan dari kinerja Kemendikbudristek juga ditunjukkan antara lain dengan indeks kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan menggunakan survei independen yang nilainya meningkat dari 81,6 di tahun 2019 sampai sekarang menjadi 86,7 poin.

Kemudian, peningkatan terjadi di semua bidang, baik itu pendidikan maupun kebudayaan, dan juga terjadi di dalam layanan yang dilihat melalui peningkatan unit layanan terpadu. Kinerja Kemendikbudristek yang semakin baik juga dibuktikan dengan berbagai penghargaan selama tahun 2023 yang diterima oleh Kemendikbudristek atau unit kerja di Kemendikbudristek, baik oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, bahkan pengakuan atau penghargaan di tingkat internasional dan regional. Yang kami cantumkan ada 32, itu belum semuanya.

Kemudian, Kemendikbudristek tetap berkomitmen dalam meningkatkan kinerja dan dukungan terhadap prioritas nasional, halaman berikutnya, yang ditunjukkan dengan capaian pada berbagai indikator kinerja sasaran strategis yang mencakup pemerataan layanan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kemudian juga pada peningkatan kontribusi perguruan tinggi dalam riset inovasi dan ilmu pengetahuan, serta peningkatan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kemudian, berikutnya kami sampaikan laporan pelaksanaan APBN tahun 2023 dan juga 2024 yang sedang berjalan. Untuk tahun 2023, Kemendikbudristek mendapatkan alokasi pagu awal sebesar 80,2 triliun yang di dalamnya terdapat tambahan tambah kurang, sehingga pagu akhir menjadi 84,5 triliun dengan penyerapan sebesar 95,49%. Ada dana yang tidak terserap diantaranya yang masih terblokir sekitar 302.000.000.000.

Untuk tahun 2024, pagu alokasi Kemendikbudristek adalah 98,99 triliun, dengan pagu harian per hari ini Bapak dan Ibu sekalian, adalah 101,38 triliun. Selisihnya merupakan tambahan pendapatan PTN-BLU, pendapatan asli dari Perguruan Tinggi dan juga ada akselerasi dana SBSN di Perguruan Tinggi.

Per 31 Mei 2024, anggaran yang telah terserap adalah sebesar 32,7 triliun atau sekitar 32,3% dari pagu berjalan. Kami tetap mengupayakan untuk terus melakukan akselerasi pencapaian pekerjaan-pekerjaan di tahun 2024.

Kemudian, terkait dengan rencana tahun 2025, termasuk juga RKP dan kebijakan Kemendikbudristek, kami sampaikan bahwa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025, Kemendikbudristek mengacu pada RKP tahun 2025 yang saat ini sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024.

Tema RKP tahun 2025 adalah “akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” yang dijabarkan di dalam lima prioritas nasional. Di dalam rencana kerja Kemendikbudristek, kita mengacu pada prioritas nasional ketiga dan kedelapan sesuai mandat yang diberikan.

Untuk prioritas nasional yang ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi, melalui peran aktif koperasi yang dijabarkan melalui arah kebijakan, memperkuat sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pendidikan sains dan teknologi.

Di Kemendikbudristek, pelaksanaannya diterjemahkan di dalam 4 program, yaitu dari program PAUD dan program wajib belajar 12 tahun, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi serta program pendidikan tinggi.

Sementara untuk prioritas nasional kedelapan, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dijabarkan di dalam RKP 2025 menjadi arah kebijakan untuk penguatan masyarakat adil, makmur dan harmonis, serta melestarikan budaya.

Di Kemendikbudristek terjemahkan di dalam pelaksanaan program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Berbagai program di atas akan didukung dengan upaya peningkatan tata kelola dan dukungan manajemen yang terus ditingkatkan kualitasnya.

Dari aspek sasaran pembangunan, rencana pencapaiannya selain melalui peningkatan kualitas pelaksanaan belanja Kemendikbudristek juga didukung dengan pengawalan yang baik pada kegiatan kolaborasi Kemendikbudristek dengan LPDP serta belanja transfer ke daerah melalui DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Selain DAK, Kemendikbudristek juga terus telah memasukkan indikator prioritas standar pelayanan minimum di bidang pendidikan, menggunakan data asesmen nasional, data angka partisipasi sekolah, kemudian juga indikator kebermanfaatan, serta iklim lingkungan belajar sebagai salah satu yang dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan di dalam perencanaan DAU *specific grant* serta pengaturan sub-kegiatannya.

Hal itu juga untuk mendorong adanya sinkronisasi pusat dan daerah dalam perencanaan pendidikan. Jadi, dengan adanya ketetapan SPM yang mengacu kepada kualitas pendidikan, daerah juga semakin memperhatikan pembiayaan pembangunan pendidikan di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, kami akan menyampaikan rencana anggaran tahun 2025 berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Nomor S346 MK02-2024 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian dan Lembaga dan juga Dana Alokasi

Khusus Tahun 2025. Kemendikbudristek mendapatkan pagu alokasi sebesar 83,19 triliun, yang di dalamnya, yang sudah kami usulkan untuk pendanaan wajib. Yaitu sebesar 41,5 triliun untuk Program Indonesia Pintar, untuk KIP kuliah, untuk berbagai tunjangan guru non-PNS, tunjangan profesi, dosen dan guru besar non-PNS, serta BUPTN, Perguruan Tinggi baik Akademik maupun Vokasi.

Kami laporkan di dalam pagu indikatif tersebut, untuk program Indonesia Pintar masih menggunakan pagu sama, pagu indikatif tahun 2024. Artinya, untuk tambahan PIP sesuai dengan pelaksanaan tahun 2024 untuk SMA dan SMK akan kita usulkan tambahannya di luar dari alokasi yang sudah ada.

Kemudian, prioritas lainnya dialokasikan sebesar 12,19 triliun, termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, pendampingan sekolah penggerak, guru penggerak, juga terkait dengan pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan, penguatan pendidikan karakter, penguatan literasi, bahasa dan sastra, dan juga berbagai tugas dan fungsi terkait dengan tata kelola, pendidikan, dan kebudayaan.

Rincian pendanaan prioritas tertuang di halaman 38-52, Bapak-Ibu sekalian. Namun, kami sampaikan nanti, Bapak-Ibu yang lain akan menyampaikan secara ringkas. Kami laporkan bahwa dengan membandingkan antara pagu tahun 2024 dengan pagu sebelumnya, berarti terjadi penurunan yang signifikan.

Pagu 2024, pagu berjalan sebesar 101,3 triliun, sementara pagu indikatif tahun 2025 baru mencapai 83.000.000.000.000. Dibutuhkan tambahan anggaran untuk memastikan program-program prioritas dapat dilanjutkan dan ditingkatkan dalam mendukung peningkatan kinerja Bidang Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Pak Menteri juga telah mengirimkan usulan tambahan anggaran sebesar 25.000.000.000.000 dengan sebaran usulan per program sebagaimana tertuang di dalam paparan kami halaman 54. Kemudian, terkait dengan dana alokasi bidang pendidikan telah dilaksanakan pembahasan multi-pihak, *multilateral meeting* untuk DAK bidang pendidikan.

Di dalam pembahasannya, disepakati adanya penguatan untuk mengakomodir kebijakan ke depan, termasuk di dalamnya rencana pelaksanaan wajib belajar 13 tahun. Untuk DAK Fisik 15,2 triliun sudah dialokasikan, tetapi detail penggunaannya sedang dalam proses, karena sedang daerah-daerah mengusulkan melalui mekanisme Krisna, platform Krisna.

Sementara, untuk yang DAK non-fisik sudah mulai ada perhitungan, berapa yang untuk dana operasional, kemudian untuk, baik itu untuk SD, SMP, maupun SMA, SMK dan juga untuk tunjangan-tunjangan guru, serta untuk museum dan cagar budaya.

Sementara itu, Pak Menteri, yang dapat kami sampaikan. Untuk yang detail per masing-masing program, mohon yang lain.

Silakan, dari Pak Nino. Oh, dari Paudasmen dulu.

Silakan, Pak Iwan.

DIRJEN PAUD, SEKOLAH DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH (Dr. IWAN SYAHRIL, Ph.D.):

Baik, terima kasih Bu Sekjen, mohon izin, Mas Menteri.

Yang saya muliakan, pimpinan, dan para Anggota Komisi X,

Izinkan saya menyambung, terkait dengan yang Paudasmen di halaman, di slide 49, *sorry* 39.

Yang pertama, penyediaan pendidikan khusus dan layanan khusus. Ini kita mendapatkan tambahan anggaran karena salah satu yang berhubungan dengan wajib belajar itu kita akan fokus ke anak tidak sekolah. Jadi, kita akan melakukan koordinasi dengan Pemda dan intervensi terkait dengan anak tidak sekolah tersebut supaya makin mengecil.

Selanjutnya, pendidikan keaksaraan, sama seperti sebelumnya, target 33.000 orang akan mendapatkan program yang berkait dengan keaksaraan dengan pagu indikatif 22.000.000.000. Selanjutnya, pendidikan kesetaraan juga sama, kita melakukan intervensi kepada pemerintah daerah untuk paket A, B, dan C, sehingga angka yang diusulkan dan pagu indikatif saat ini sebesar 11,4 miliar.

Selanjutnya, di *slide* nomor 40, salindia 40. Nomor 7 satuan pendidikan yang mendapat pendampingan sekolah penggerak, ini dengan anggaran yang sama 119.000.000.000 kita akan menysasar target yang lebih besar, karena pada saat ini kita fokus sekolah-sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang lain. Jadi yang akan terdampak akan lebih besar dengan skema pengimbasan tersebut.

Selanjutnya, satuan pendidikan yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu, ini berkaitan dengan bagaimana melakukan perencanaan berbasis data dengan menggunakan rapor pendidikan, asesmen nasional dan juga dukungan pembelajaran yang berbasis transformasi digital. Kita akan menysasar ke semua Pemda dengan anggaran di pagu indikatif sebesar 1 triliun lebih.

Slide, salindia berikutnya untuk pendampingan Kurikulum Merdeka. Kita juga akan berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah untuk mendampingi penerapan Kurikulum Merdeka dengan besaran anggaran di pagu indikatif sebesar 97.000.000.000. Penyediaan layanan Paud holistik integratif, kita akan menysasar ke-50 Pemda yang betul-betul memiliki angka *stunting* yang paling rendah untuk kemudian bisa diintervensi dan kemudian

dengan anggaran sebesar Rp 31.000.000.000.

Yang terakhir, terkait dengan satuan pendidikan melaksanakan program UKS dan karakter. Di sini angkanya ada anggaran yang dipindahkan dari sebelumnya. Ini untuk mendukung Merdeka Belajar 25 untuk penanganan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan terkait masalah perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi.

Sebelumnya itu ada di bagian peningkatan kualitas mutu, Bappenas kemudian mengusulkan dipindahkan sejajar dengan program UKS. Jadi, di sini ada tambahan sekitar 49.000.000.000, jadi menjadi 99.000.000.000.

Saya rasa itu dari kami. Kami kembalikan, Pak Bu Sekjen.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A, Ph.D.):

Terima kasih, Pak Nino, Pak Iwan.

Berikutnya barangkali sesuai dengan halaman, Pak Amin, untuk bisa menjelaskan terkait dengan badan bahasa dan juga kebudayaan. Karena mohon maaf, Pak Dirjen, ditugasi oleh Pak Menteri untuk tugas yang lain.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA (Prof. ENDANG AMINUDIN AZIZ, MA., Ph.D.):

Baik, terima kasih, Bu Sekjen.

Untuk badan bahasa ini ada tiga program fokus sebetulnya.

Yang pertama, terkait dengan literasi, literasi kebahasaan dan kesastraan dan ini kami tetap akan fokus kepada pembinaan para penutur dan institusinya. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyediaan bahan-bahan bacaan bermutu yang pada tahun 2022 kita mulai dengan inisiasi penyediaan buku untuk PAUD dan sekolah dasar.

Kemudian, tahun ini kita gunakan untuk sekolah dasar saja dan tahun yang akan datang kita akan tambahkan untuk sekolah dasar yang kelas atas ya, kelas 4, 5, dan 6. Kemudian untuk yang kedua, programnya perlindungan bahasa daerah, ini melalui revitalisasi bahasa daerah yang pada tahun 2021 kita mulai dengan 5 bahasa daerah dan pada tahun ini sudah ada sampai 93 bahasa daerah.

Mudah-mudahan tahun depan ini kita bisa tambahkan lagi dengan jumlah sekitar 100 bahasa daerah, begitu. *Nah*, tapi ada yang tahun depan itu perlu kita lakukan kembali yaitu pemetaan bahasa daerah, bahasa dan sastra daerah, karena ternyata pada tahun 2019 ketika kita punya peta bahasa daerah di Indonesia, peta itu sudah tidak lagi relevan.

Banyak bahasa yang sudah berubah status, ada juga yang sudah mulai apa, kehilangan penuturnya dan ditemukan bahasa-bahasa baru yang belum terdaftar di dalam peta itu. Maka kami akan melakukan pemetaan ulang terhadap bahasa-bahasa dan sastra daerah itu.

Kemudian seperti tadi dalam pengantar, Bu Sesjen menyebutkan tentang pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional melalui sidang umum UNESCO. Ini tahun yang akan datang kita akan gelorakan lagi dengan berbagai cara. Yaitu penambahan jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia, lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia, dan juga membawa sastra Indonesia ke pentas dunia. *Nah* ini yang akan kami lakukan pada tahun depan.

Kemudian untuk selanjutnya untuk yang kebudayaan. *Nah* untuk yang kebudayaan ini programnya masih tetap fokus kepada hal-hal yang lebih terkait dengan pemberdayaan masyarakat atau komunitas budaya.

Misalnya, itu di nomor empat ada fasilitasi kemitraan bidang kebudayaan, kemudian penambahan jumlah *event* kebudayaan, di situ ada di nomor 6. Kemudian pelibatan unsur-unsur budaya di dalam satuan pendidikan, itu ada di nomor 7. Kemudian, perhatian terhadap masyarakat adat, itu juga akan menjadi fokus tetap pada tahun 2025 yang akan datang. Dan yang terakhir tentu saja terkait dengan pengembangan talenta-talenta bidang kebudayaan. Dan ini semua dirangkum di dalam kebijakan 2025 sebagai penguatan untuk program yang sudah dilakukan pada tahun-tahun yang sebelumnya.

Saya pikir itu, Bu Sekjen, dari bahasa dan kebudayaan.

Terima kasih, Pimpinan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A, Ph.D.):

Terima kasih.

Yang untuk Pak Sekjen tadi juga sudah saya sampaikan berbagai program termasuk di dalamnya untuk PIP dan aneka tunjangan guru.

Berikutnya yang untuk program-program terkait dengan penguatan guru dan tenaga kependidikan.

Silakan Bu Dirjen.

DIRJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Prof. Dr. NUNUK SURYANI, M.Pd.):

Baik. Terima kasih, Bu Sekjen.

Pimpinan Komisi X dan Anggota yang saya hormati,

Saya akan melanjutkan terkait dengan usulan pendanaan untuk guru.

Yang pertama, terkait dengan pendidikan guru penggerak. Di sini kami sampaikan bahwa untuk tahun 2025, sasaran 16.264 dan anggarannya turun menjadi 315.000.000.000. Dan ini bukan berarti kami membutuhkan hanya 16.000 tetapi mengingat terkait penurunan anggaran yang ada di GTK, maka pemenuhan sasaran PGP akan diusulkan melalui penambahan anggaran. Ini mempertimbangkan penurunannya hingga 2,3 triliun.

Kemudian, berikutnya terkait dengan pendidikan profesi guru, di sini usulan di pagu tahun 2025 sebesar 163.762 dengan anggaran 114.000.000.000. Ini diperuntukkan penyesuaian penambahan biaya seleksi PPG pra jabatan. Selanjutnya, untuk pengembangan karir dan penghargaan guru, kami juga ada penambahan dari DIPA tahun 2024, yang mana di sini kami mengusulkan 47.307, sasaran dengan anggaran sebesar 379.000.

Dan selanjutnya, penyusunan kebijakan penataan guru di daerah dengan anggaran sebesar 126.000.000.000, ini adalah untuk penuntasan seleksi ASN PPPK yang tahun 2025 masih menyisakan beberapa guru non-ASN. Dan yang nomor 17 halaman 44, terkait dengan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk implementasi Kurikulum Merdeka, anggaran sebesar 970.000.000.000 untuk 147.000 sasaran. Ini diperuntukkan untuk program PKG guru yang meliputi IKM, PKG Bahasa Inggris, PKG PJOK, dan PKG Literasi-Numerasi, serta pengembangan bahan model pembelajaran pada PMM.

Kemudian, untuk guru PAUD dan Dikmas yang difasilitasi kompetensi melalui program kemitraan, atau *stunting* di sini, sebesar target 2.000 sasaran dengan anggaran 15.000.000.000 dan yang terakhir guru pembimbing khusus atau guru inklusi dengan target 2.482 dengan anggaran 39.000.000.000.

Demikian, Bu Sekjen. Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A, Ph.D.):

Terima kasih, Bu Nunuk.

Kami sampaikan bahwa untuk program peningkatan kualitas guru juga dilakukan pembiayaannya melalui kerja sama dengan LPDP. Jadi di sana juga disediakan anggaran untuk itu. Terkait dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, banyak program yang dilaksanakan melalui BESKAP.

Silakan, Pak Nino.

**KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
(ANINDITO ADITOMO, S.Psi., M.Phil., Ph.D.):**

Terima kasih.

Selamat siang,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi X,

Untuk BSKAP, yang pertama ada bahan kebijakan, soal, dan model asesmen yang dikembangkan. Ini soal-soal terutama untuk asesmen nasional, jadi AKM, literasi-numerasi, survei lingkungan belajar, survei karakter, tapi juga ada beberapa asesmen yang lain seperti tes bakat dan minat, tes kebugaran, dan seterusnya, ini sebesar 36,4 miliar.

Yang berikutnya, ada pengujian pendidikan yang terlayani. Ini mengacu pada mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang kita tes setiap tahunnya. Juga untuk PPG, tes PPG baik pra jabatan maupun dalam jabatan, sebesar 118.000.000.000.

Kemudian yang kedua, satuan pendidikan nomor 22 satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen ini adalah satuan pendidikan yang melakukan asesmen nasional untuk jenjang dasar dan menengah, survei lingkungan belajar di tingkat PAUD, juga satuan pendidikan yang kita layani untuk tes bakat dan minat muridnya, uji kesetaraan, dan juga satuan-satuan pendidikan yang tahun depan akan melaksanakan PISA, sebesar 107,5 miliar.

Berikutnya untuk akreditasi, baik formal maupun non-formal, dari PAUD sampai dengan dan pendidikan menengah, itu sebesar 259,8 miliar. Untuk bahan kebijakan serta kurikulum dan perangkat pembelajaran, ini seluruh perangkat pembelajaran yang digunakan untuk Kurikulum Merdeka. Jadi mulai dari asesmen kelasnya, modul ajar, contoh-contoh kurikulum sekolah, itu sebesar 70,9 miliar.

Kemudian, bahan kebijakan dan penyusunan buku pendidikan dan buku umum, ini untuk menyusun buku-buku teks di Kurikulum Merdeka, buku-buku bacaan penunjangnya, juga untuk melakukan penilaian terhadap buku-buku yang dikembangkan oleh penerbit swasta, sebesar 58,4 miliar rupiah.

Di halaman berikutnya, pengawasan pemanfaatan buku, ini monev yang dilakukan untuk melihat bagaimana buku-buku kita dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan buku teks dan non-teks yang kita susun, sebesar 6.000.000.000. Kemudian, ada pengembangan bahan kebijakan, isu strategis, rapor pendidikan dan standar nasional.

Ini prinsipnya monev-monev yang kita lakukan terhadap program prioritas Kemendikbudristek, tapi juga monev terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan melalui *platform* rapor pendidikan, sebesar 37,4 miliar. SDM untuk penilaian pendidikan, pengembang kurikulum dan pengembang

perbukuan, kita juga melatih beberapa orang. Tahun depan rencananya 5,7 miliar.

Dan yang terakhir, sistem informasi untuk kurikulum, perbukuan, serta asesmen. Mungkin yang baru tahun depan adalah kita juga akan membuka data asesmen nasional untuk bisa diakses secara lebih terbuka oleh publik dan peneliti sebagai bagian dari akuntabilitas sebesar 7,6 miliar.

Sekian, terima kasih.

Demikian, Bu sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A, Ph.D.):

Terima kasih, Pak Nino.

Terkait dengan program pendidikan tinggi, ada yang dilaksanakan oleh Sekjen, ada juga yang dilaksanakan oleh Dirjendikti. Untuk Sekjen, kami melaksanakan program KIP kuliah yang alokasi anggarannya tahun depan diusulkan meningkat dari tahun sekarang 13,99 triliun menjadi 14,69 triliun lebih. Karena adanya satuan biaya yang berubah, kemudian berubah untuk sebagian, maksudnya bukan kebijakan peningkatan satuan biaya.

Kemudian, juga biaya ADIK di sini hanya sedikit karena alokasi anggarannya, pembiayaannya, beasiswa yang sendiri menggunakan dana LPDP. Kemudian, usulan terkait dengan beasiswa unggulan masih lanjut, utamanya untuk program-program yang tidak dibiayai melalui program-program reguler.

Kemudian, untuk tunjangan profesi dosen dan tunjangan guru besar, ini kami alokasikan sebesar 2,5 triliun rupiah. Kemudian, berikutnya silakan Pak Dirjen Diktiristek untuk menyampaikan program-program yang dilaksanakan melalui Dirjen Diktiristek.

Monggo.

DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI (Prof. Dr.rer.nat. ABDUL HARIS, M.Sc.):

Terima kasih, Bu Sekjen.

**Izin Pimpinan dan anggota Komisi X yang kami muliakan,
Dan Pak Mas Menteri,**

Jadi, perlu kami sampaikan untuk kegiatan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek ini, kami terus melanjutkan upaya revitalisasi sarana dan prasarana PTN. Dan tahun ini memang sudah bagus dan banyak kami hasil pengamatan, evaluasi di lapangan semuanya berjalan dengan baik. Dan ini memang sangat dibutuhkan.

f

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Pak Haris, suara kurang keras sedikit, Pak, dideketin.

DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI (Prof. Dr.rer.nat. ABDUL HARIS, M.Sc.):

Dan ini memang sangat dibutuhkan oleh kampus-kampus. Kerjaan ini sudah baik, hasil evaluasi terakhir kami ke lapangan. Itu memang anggaran yang diperlukan kurang lebih 2,8. Dan ini sudah merupakan pagu indikatif tahun 2025.

Kemudian, untuk program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ini juga merupakan program utama dari Kementerian dan kami terus mengupayakan agar ini program ini terus meningkatkan pemanfaatannya. Jadi, paling tidak kita meningkatkan dari targetnya dari 156.000 menjadi 161.000.

Dan program berikutnya, itu terkait dengan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi. Memang satu sisi kita harus berusaha menyehatkan ya dari sisi kelembagaan. Seperti contoh ini, mutu kelembagaan perguruan tinggi, terus kita kembangkan dengan sasaran targetnya adalah 905 lembaga. Kemudian juga yang poin B, ini perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan kelembagaan.

Kami sangat fokus dengan *right sizing* ya untuk perguruan tinggi swasta. Sehingga upaya penggabungan PTS ini dalam rangka meningkatkan kualitas, kita juga berikan insentif begitu, anggarannya kurang lebih sama dengan tahun lalu. Kemudian juga program pembinaan PTS sendiri, terus kita juga berikan. Ini bagian dari keberpihakan, karena bagaimanapun PTS juga memberikan kontribusi yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi ini.

Kemudian terkait dengan akreditasi, ini juga penting, karena kemarin dengan kebijakan Permendikbud 53, kita juga harus memberikan dan mendorong agar akreditasi lembaga ini juga terus dilakukan. Ini mungkin banyak permasalahan *case* yang ada di PTS ini. Dan kita terus memberikan semacam konsultasinya untuk bisa membantu mereka dalam menyelesaikan program akreditasi ini.

Kemudian berikutnya, kita juga terus mengembangkan program kompetisi Kampus Merdeka. Ini juga kita menyasar kurang lebih 300 lembaga, karena mungkin sebagian besar tahun lalu juga sudah banyak lembaga-lembaga yang sudah kita berikan bantuannya.

Kemudian yang ke-9, ini terkait dengan pengembangan, penelitian, dan kerja sama bidang pendidikan, gizi, pangan, dan sains di kawasan Asia Tenggara. Saya pikir ini bagian dari mandat dari Indonesia dalam keanggotaan ASEAN dan ini kemarin juga sudah menyampaikan laporan. Satu sisi memang kita perlu menyehatkan dari sisi kelembagaannya.

Kemudian berikutnya, adalah terkait dengan BOPTN penelitian. Kita mungkin ada sedikit penurunan dari sisi anggaran menjadi 1,9 dari sebelumnya 2.000.000.000.000. Kemudian untuk BOPTN non-penelitian, ini juga kita berikan, karena ini juga menyangkut bagian dari bantuan dalam penyelenggaraan. Ini memang ada sedikit relevansinya kemarin dengan masalah uang kuliah.

Dan yang ke-12, ini juga peningkatan kualitas SDM. Ini juga terus program-program ini kita kembangkan untuk juga memberikan peningkatan kualifikasi dalam penyelenggara dari para pendidik ini di SDM-nya. Dan juga ini menyangkut beasiswa kemitraan negara berkembang yang terus kita upayakan, karena bagaimanapun ini bagian dari program yang bisa di-*recognize* secara global. Kita memberikan akses pada mahasiswa asing untuk bisa belajar di negara kita.

Kemudian juga layanan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini juga kita tahun 2025 dengan anggaran kurang lebih yang *more less* sama dengan tahun lalu.

Dan ini mungkin yang bisa kami sampaikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A, Ph.D.):

Terima kasih, Pak Dirjen.

Untuk yang nomor 13 itu yang pendanaannya dari murni dari perguruan tinggi sendiri. Jadi penerimaan perguruan tinggi, baik itu PTN Satker maupun PTN BLU. Di dalam program pendidikan tinggi, ada juga LL Dikti yang pendanaannya dialokasikan melalui Sekjen, karena koordinasi antara Dikti dan Diksi kami alokasikan sebesar 98,59 miliar rupiah dan juga ada fasilitasi layanan beasiswa pendidikan Indonesia yang tadi ditanyakan oleh Pak Dede. Ini adalah hanya biaya pengelolaan saja, biayanya sendiri, beasiswanya dialokasikan melalui dana hasil LPDP.

Berikutnya, terkait dengan program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Silakan, Bu Dirjen.

DIRJEN PENDIDIKAN VOKASI (Dr. Ir. KIKI YULIATI, M.Sc.):

Terima kasih, Bu Sekjen.

Izin, pimpinan dan para Bapak-Ibu Anggota Komisi yang terhormat, menyampaikan mengenai program prioritas untuk pendidikan vokasi.

Pada tahun 2025, targetnya memang masih kita akan mengupayakan

penguatan SMK melalui SMK Pusat Keunggulan, baik yang berskema reguler maupun yang berskema dengan dana padanan bermitra dengan industri. Lalu kami juga akan mengupayakan peningkatan SMK, kualitas pembelajaran di SMK melalui SMK yang mengoperasikan atau menerapkan pembelajaran berbasis pabrik atau *teaching factory*.

Dan kemudian, kami mengupayakan juga penguatan kemitraan antara satuan pendidikan dengan dunia usaha, dunia industri di berbagai daerah berbasis potensi daerah dengan menginisiasi satuan pendidikan agar mereka mampu dan berdaya untuk membangun kemitraan di wilayahnya masing-masing.

Kemudian, dengan adanya intervensi pendidikan vokasi selama empat tahun terakhir, kami ingin menguatkan sistem dan mekanisme penelusuran alumni atau kita sering mengenal dengan *tracer study*. Baik untuk lulusan SMK maupun perguruan tinggi vokasi untuk memastikan relevansi lulusan dengan mengukur kebermanfaatan, berapa banyak yang wirausaha, sekaligus berapa banyak yang mampu melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi.

Pada saat yang sama, mengingat kita masih melihat banyak kebutuhan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak berada di dalam sistem persekolahan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi masih mengalokasikan program kecakapan kerja dan program kecakapan wirausaha yang pada tahun depan akan ditargetkan sekitar 19.000 sasaran, 19.000 orang.

Kemudian untuk BOPTN penelitian, yang nantinya akan dibagikan atau diberikan kepada perguruan tinggi berbasis proposal, kita akan mengalokasikan 218.000.000.000 termasuk di dalamnya *matching fund* yang bekerjasama dengan industri. Kemudian, kita juga ingin menguatkan program-program studi di perguruan tinggi vokasi untuk mampu mengembangkan kurikulum *link and match*. Kami menggunakan istilah taut-suai, itu terjemahan dari *link and match*, sedemikian rupa sehingga program studi dapat menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada kebutuhan industri.

Kemudian, kami juga melihat bahwa masih diperlukan penguatan pada aspek guru maupun dosen. Oleh sebab itu pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas, laboran, dan berbagai tenaga pendidikan lainnya, kami mengintervensinya melalui program *upskilling* dan *reskilling*, baik dilakukan pada guru, instruktur kursus, maupun pada dosen.

Dan kemudian, sarana prasarana di perguruan tinggi vokasi akan diintervensi melalui program revitalisasi sarana-prasarana perguruan tinggi vokasi, baik untuk PTN maupun PTS. PTS yang diintervensi adalah perguruan tinggi berbentuk politeknik maupun akademik.

Kemudian, dana kompetitif yang disiapkan adalah untuk penguatan program studi vokasi, Kampus Merdeka, dan kita ingin mendukung juga upaya-upaya kampus menjadi pusat-pusat pengembangan, pembelajaran dan tempat melakukan berbagai aktivitas yang lebih ramah lingkungan dengan kampus bebas karbon. Kemudian juga dilakukan khusus untuk pembinaan PTS, karena

kami melihat beberapa sebagian PTS masih memerlukan bantuan pembinaan dari kita.

Kemudian pada halaman berikutnya, yang halaman 52, ini juga kami mengintervensi untuk siswa SMK yang memerlukan persiapan untuk program magang keluar negeri, berupa bantuan penyiapan kemampuan bahasa serta penyiapan dokumen-dokumen yang jika mereka perlukan itu perlu kita beri bantuan.

Kemudian mengupayakan peningkatan kewirausahaan dan pembinaan usaha kesehatan sekolah di SMK, kemudian ada juga intervensi untuk menguatkan lembaga kursusnya selain kepada penerima atau peserta kursus. Kami harapkan dengan menguatkan lembaga kursusnya, suatu hari mereka lebih mandiri untuk memberikan layanan pendidikan kursus yang lebih berkualitas.

Kemudian, BOPTN non-penelitian yang ini dialokasikan kepada seluruh perguruan tinggi negeri berbentuk politeknik dan akademi komunitas negeri dan program-program lain yang kami usulkan adalah rekomendasi pengembangan kelembagaan. Ini berkaitan dengan pembiayaan yang sekarang harus kami siapkan untuk pembukaan izin prodi maupun pendirian perguruan tinggi.

Sebab dengan mekanisme yang ada, pembiayaan izin ini diperlukan apabila prodi tersebut memerlukan validasi dari lama. Selama ini, hampir tidak ada biayanya karena itu bagian dari manajemen program dari kami, manajemen operasional. Namun karena ada bagian pembiayaan yang harus dibayarkan ke LAN. Untuk perizinan, dalam hal ini validasi akreditasi, maka ada pengembangan kelembagaan di sana.

Kemudian, kami juga mengusulkan modernisasi laboratorium khusus untuk PTN atau Politeknik maupun Akademi Komunitas Negeri, mengingat kebutuhan peningkatan teknologi untuk meningkatkan relevansi lulusan sangat-sangat cepat dinamikanya sehingga modernisasi alat atau laboratorium di Perguruan Tinggi Vokasi perlu diperkuat.

Dan pada saat ini ada beberapa Perguruan Tinggi Vokasi, Politeknik Negeri yang kami nilai sudah hampir siap menjadi PTNBH. Pada saat itu beberapa hal yang memang perlu diperkuat dari politeknik-politeknik ini, kami berikan intervensinya agar mereka suatu saat dalam waktu dekat bisa menjadi PTNBH.

Demikian program dari Pendidikan Vokasi tahun 2025.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK (Ir. SUHARTI, M.A, Ph.D.):

Terima kasih, Ibu Dirjen.



Berikutnya, program terakhir yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek adalah program dukungan manajemen. Ini program yang dilaksanakan oleh semua unit utama dengan total anggaran 20,15% di pagu indikatif. Di dalamnya termasuk gaji 18.000.000.000.000 sendiri, gaji dan layanan perkantoran.

Kemudian, juga ada bantuan pemerintah di situ untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pendidikan tetapi yang tidak dibiayai melalui kegiatan reguler maupun yang ada di dalam menu di dalam DAK. Kemudian, juga ada anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi atase pendidikan dan kebudayaan dan kerja sama luar negeri. Ini kita punya 18 atase yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.

Kemudian, juga untuk pelayanan infrastruktur TIK dalam koordinasi Sekjen plus yang cukup besar adalah peningkatan kompetensi pegawai. Di situ ada diklat, baik itu untuk CPNS maupun diklat teknis dan lainnya yang dilaksanakan melalui pusat pendidikan, pusat pelatihan Kemendikbudristek dengan anggaran total sekitar 143.000.000.000.

Saat ini, jumlah pegawai Kemendikbudristek total, termasuk dosen PNS, sebesar 125.000 yang keseluruhannya juga mendapatkan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan latihan minimum 20 jam pelajaran per tahun, tetapi tidak semuanya dilakukan melalui diklat luring.

Kami menyiapkan *platform* untuk pelatihan pegawai yang juga kami berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Demikian, Pak Menteri, yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Menteri.

MENDIKBUDRISTEK (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.B., M.B.A):

Terima kasih, Bu Sekjen, sama semua Dirjen.

Demikian dari kami, saya kembali ke meja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Terima kasih Pak Menteri dan juga seluruh jajaran Eselon 1 yang sudah menyampaikan paparannya.

Jadi kurang lebih pagu anggaran 2025 adalah sekitar 83.187.000.000.000 dan diharapkan akan ada penambahan atau usulan penambahan 25.013.000.000.000 sekian. Untuk itu saya berikan kesempatan kawan-kawan, ini kan pada dasarnya ini hanyalah usulan.

Saya perlu sampaikan bahwa nanti kita akan ada lagi rapat-rapat RDP pendalaman terkait nomenklatur-nomenklatur tersebut, di mana di situ Komisi X bisa memiliki usulan mana yang perlu ditambah dan mana yang perlu dikurangi.

Saya berikan kesempatan, tapi waktunya saya tetapkan sekitar selesai pukul 1, karena kebetulan Saudara Menteri harus mengantar keluarga istri ke luar negeri untuk berobat. Setuju, jam 1 ya? Baik.

Silakan, untuk pertanyaan dari PDIP. Per fraksi saja, ya? Per fraksi, PDIP, Pak Andreas sama Bu Adriana. Lalu dari Golkar, Pak Ferdi.

Oke, dari habis Golkar, Gerindra ada? Oh iya, pemahok, penguasa. Pak Yan mau? Baik. Pak Johar, Pak Yan, lalu kemudian dari Nasdem ada, Nasdem? Ibu Lisda. Dari PKB, Pak Andi. Dari Demokrat, Ibu Anita, benar ini Ibu Anita? Padahal sudah pakai baju biru, oke. Dari PKS, Bu Ledia? Oh ya, dan Habib Fahmi. Dari PAN ada, ya? Dari PPP, Ibu ada yang mau disampaikan nanti? Baik saya open ya.

Baik. Silakan, Pak Andreas. Mohon mengingat waktu, jadi kalau bisa kita yang taktis saja.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PARIERA):

Baik, terima kasih.

Pak Pimpinan serta seluruh anggota Komisi X yang saya hormati, Mas Menteri, Bu Sekjen dan seluruh jajaran Kemendikbud yang saya banggakan,

Terima kasih.

Saya langsung saja, poin per poin, Bu Sekjen, Pak Menteri. Tahun lalu, sebenarnya sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan operator sekolah. Jadi, bagaimanapun soal, bukan hanya PIP, PIP salah satunya, tapi instrumen yang kita sudah punya yang paling canggih dan saya kira yang sangat bagus dari yang ada di Kemendikbud ini, harus dilengkapi dengan operator di daerah.

Di sekolah-sekolah itu harus punya operator dan mereka harus terlatih dengan baik. *Nah*, ini yang sampai sekarang banyak kendala-kendala, termasuk PIP yang kami hadapi, itu karena sekolah-sekolah itu ada yang punya tapi banyak juga, di daerah terutama, paling tidak di dapil saya, saya tahu. Banyak satu, satu orang operator itu bekerja untuk dari SD, SMP, SMA, di satu kecamatan.

Jadi, dia kerja *by project*, *by*, apa, *hire by project*, gitu dari sekolah-sekolah. Sehingga, ini perlu ada *treatment* khusus, ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan pentingnya operator di sekolah dan tiap sekolah punya

operator dan mereka terlatih. Entah itu boleh gurunya atau dari luar, tapi harus ada operator. Kalau tidak banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan sekolah, kepentingan kita di Dapodik itu terhambat karena itu.

Kami pernah ke Bali, kunjungan kerja di Bali. Ada beberapa SMK yang kita kunjungi, bagus sekali, karena mereka punya operator yang bagus dan saya kira ini perlu perhatian khusus untuk kepentingan komunikasi dan kelancaran, kepentingan pendidikan kita di sekolah-sekolah.

Kemudian, yang berikut yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, Pak Dirjen, soal penggabungan PTS. Saya kurang paham maksudnya penggabungan PTS ini, apakah penggabungan PTS ini juga adalah bagian dari usulan, beberapa usulan yang pernah termasuk dari daerah saya, usulan dari PTS untuk menjadi PTNBH yang sudah dalam proses tapi kemudian sampai sekarang belum berjalan. Mereka sudah siap dengan semua data-data dokumen tapi sampai sekarang belum berjalan, apakah ini masuk dalam program ini? Kalau belum ada, saya kira mungkin penting masuk di dalam program ini. Data-data yang kebutuhan kalau masih ada, saya siap untuk menyampaikan ke Pak Dirjen untuk ditindak lanjut. Karena periode kemarin ketika Pak Dirjen yang lama, ini belum sempat dilanjutkan.

Kemudian, *sorry-sorry*, masih ada satu-dua lagi. Yang berkaitan dengan SMK, kepentingan SMK, Bu Dirjen. Kami mendapat banyak sekali keluhan dari daerah, terutama siswa-siswa SMK di daerah kami yang tidak bisa, tidak mempunyai kesempatan untuk bisa melakukan praktek kerja. Karena BLK-nya tidak ada, mereka tidak ada industri di daerahnya, sementara mereka mau melakukan pelatihan, hampir tidak ada kesempatan. *Nah*, ini harus ada solusi buat mereka, gitu. Apakah kita bangun industri di daerah, atautkah mereka dikirim ke daerah yang punya ada industri seperti itu.

Saya kira ini yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Ibu Adriana.

F-PDIP (Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBEY, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati, Pimpinan,
Dan juga Bapak Menteri dengan jajarannya dan teman-teman yang ada di
Komisi X,**

Saya hanya ingin usulkan untuk SMA dan SMK, karena sesuai hasil kunjungan saya ke Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa di sekolah yang ada di SMA Tomohon dan juga di SMK SMA Guru Lombok yang ada di Minahasa Utara, di

sana ada gedung laboratorium tapi sampai sekarang ini tidak ada peralatan laboratorium, berbalik dengan yang ada di SMK Tomohon. Ada peralatan, tapi tidak ada gedung. Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan supaya dalam program tahun 2025 atau 2024 dengan tambahan anggaran tolong dapat diberikan gedung dan juga peralatan.

Kemudian yang kedua, mungkin di luar konteks, karena kita di Sulawesi Utara, ada sekolah politeknik pariwisata yang saat ini sudah dibangun gedung, pemerintah sudah siapkan tanah, gedung sudah ada, guru sudah mulai melaksanakan pengajaran, murid-murid sudah ada. Tapi sampai sekarang ini izin untuk dari Mendikbud belum ada. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan agar supaya permasalahan ini agar segera dapat diselesaikan.

Itu saja yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Terima kasih.

Berikutnya dari Golkar, Pak Ferdy.

F-GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Terima kasih, pimpinan.

**Para pimpinan yang kami hormati,
Para Anggota,
Mas Menteri, serta seluruh jajarannya,**

Karena diminta cepat dan tepat, maka yang prinsip-prinsip dan nanti yang itu ditindaklanjuti. Artinya bahan, asal tidak ada perubahan ya, jadi artinya bahan ini, ketika nanti kita RDP, menjadi acuan. *Nah*, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dicermati. Tolong nanti para pejabat Eselon I juga nanti mencermati kembali. Saya per halaman aja, nanti tolong dicermati kembali setiap halaman.

Jadi, pertama halaman 11, *nggak* tahu siapa yang nanti akan menjawab, nanti di RDP, jadi ketika kami mempertanyakan nanti jawabnya di RDP. Halaman 11, halaman 13, kemudian halaman 18, kemudian halaman 36, halaman 37, halaman 38, halaman 39, kemudian halaman 40, halaman 41, halaman 43, halaman 44, halaman 45, halaman 46, halaman 47, halaman 48, halaman 49. Itu yang relatif perlu dicermati, termasuk juga halaman 57.

Secara garis umum yang saya ingin komentari, Bapak dan Ibu Anggota dan Pimpinan serta Mas Menteri, minta anggaran tapi kita jangan bicara keluar dulu, jadi bicara internal. Kerap kali ini menjadi perhatian kita bersama. Berarti kita belum mampu dengan segala hormat dan kerendahan hati,

Kemendikbudristek tidak mampu mempresentasikan itu kepada pihak lain ketika trilateral, itu penilaian kami. Makanya anggaran itu turun.

Jadi, sebelum kita menyatakan itu perlu tambahan, yakinkan dulu bahwa ini apa dasarnya. Contoh yang paling mudah dan paling gampang adalah mengenai satuan *unit cost* yang selalu berkali-kali saya ingatkan. Kalau bicara BOS baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, ataupun juga, kemarin kita baru gaduh tentang UKT.

Karena tidak ada standarisasi komponen biaya yang dibuat secara transparan dan akurat dan melibatkan pemangku kepentingan. Itu kuncinya. Lemah sekali di situ. *Nah*, itu yang menjadi titik utamanya. Kalau itu dilakukan komponennya ataupun dibuat rinciannya, tentu dan diajak masyarakat pemangku kepentingan untuk berdiskusi, saya tidak katakan, akan hilang, tapi saya punya keyakinan itu bisa diminimalkan.

Termasuk juga UKT yang kemarin kita gaduh. *Nah*, itu kenapa itu gaduh? Karena tidak dilibatkan. *Nah*, seyogyanya kalau mau ideal harus per prodi, per PTN beda-beda, karena prodi di PTN A dan di PTN B walaupun prodinya sama, karena wilayahnya berbeda, jumlah ataupun nilai UKT ini akan berbeda, tidak akan sama.

Berarti kan ketidakmampuan kita untuk membuat itu. Lagi-lagi, kita siap mendukung untuk penambahan biaya, ataupun anggaran. Tapi presentasikan dulu, yakinkan dulu internal kita. Mitranya diyakinkan dulu, kalau *nggak* yakin ya mitranya gimana? Itu catatan pertama.

Catatan kedua, tidak semua kegiatan kita tahu, di Kemendikbudristek. Tidak pernah dilibatkan? Ya jangan salahkan kami, itu yang *nggak* pernah dilakukan. *Nah*, dari sini juga nanti Mbak Harti, selaku Sekjen juga, PNBPN *nggak* pernah ditampilkan di sini. PNBPN-nya berapa? *Nggak* ada PNBPN, berapa nih nilainya berapa di sini? Kan harusnya PNBPN-nya berapa, karena Anggaran Pertimbangan Belanja Negara juga menyangkut PNBPN.

Kemudian juga berapa sih jumlah karyawan Dikbud, kalau terjadi angka nih Bu, ya? Sedikit lagi Pak, supaya nanti *clear*. Ada perbedaan angka di halaman berapa, ada yang 20, tentang dukungan, manajemen, dan layanan. Ada yang 20, ada yang 18, tadi Bu Harti menyampaikan yang 18 itu, ternyata angkanya kosong tuh, mbak. *Nggak* ada 1 bulan, atau 1 tahun, atau 12 bulan, biasanya kan 13 bulan itu kosong angkanya. Coba halaman 52 lihat deh, eh ulangi, bukan, yang halaman 53, ini contoh aja. Typo, bu, tapi prinsip, coba halaman 53 kan kosong itu, masa target kosong. Makanya saya seragamkan dulu ini bahannya yang ini bukan? Supaya jangan salah nanti kita RDP, itu yang juga jadi pertimbangan. Targetnya itu apa bulan, apa satu, apa apa nih? Mungkin juga perlu penjelasan. Ini sebagai contoh-contoh saja.

Termasuk bicara digitalisasi. Ini contoh, ini kepala humasnya siapa nih? Bilang kita digitalisasi, Tapi *engagement rate*-nya jelek. Postingan dari 8.056 postingan dengan pengikut 2,7 juta dengan mengikuti 499, *engagement rate*-nya cuma 0,13. Ini kementerian apa? Kata siapa? Katakan aja Pluang.com.

Jadi rata-ratanya yang *like* cuma 4.054 yang komen 51. Kalah sama IG-nya Dede Yusuf. Ini lembaga, negara yang biyai. Dede Yusuf pakai APBD Anggaran Penerimaan dan Belanja Dede Yusuf.

Nah, ini tolong-tolong perhatian, kan sederhana. Makanya bilang digitalisasi tapi belum berbudaya digital juga. Ini contoh konkret, coba di kalau nggak pertanyaan, tanya pluang.com aja. Bukan kata saya, hari ini bisa juga. Jadi, itu banyak yang banyak kita cermati.

Termasuk juga himbuan Pak Presiden, pengurangan aplikasi. *Nah*, ini hampir setiap Satker punya aplikasi. Berapa jumlah aplikasi tersebut? Itu yang harus dicatat. Jadi, banyak yang sebenarnya harus kita kritisi nanti, sebelum kita menyatakan memang kita akan tambah, tapi kita *nggak* ngerti gimana. Ini mitra apa mitra-mitraan? Saya menganggap ini mitra-mitraan.

Tidak pernah, kan? Coba jujur per satker, pernah *ngajak* berapa kegiatan? Buka, dong. Jangan bengong-bengong aja. Coba jujur, berapa kegiatan per satker? *Nggak* ada yang tau kita secara detil. Bagaimana yang lain yang baru-baru.

Itu aja Pimpinan. Jadi kesimpulannya adalah kita nanti dalam pendalaman harus bisa menjawab yang kami utarakan tadi. Bisa dicermati artinya secara.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, Pak.

F-GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Cepat saja.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Terima kasih Kang Ferdy, yang sudah mengingatkan saya kalau Medsos saya ternyata agak lumayan walaupun tidak ada biayanya Pak.

Berikutnya dari Fraksi Gerindra, Pak Djohar.

F-P.GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Terima kasih.

**Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati,
Saudara Menteri seluruh jajaran,**

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita tahu situasi kita ini nanti yang menjalankan kegiatan-kegiatan anggaran kita adalah pemerintah yang baru dan juga akan dibahas oleh anggota DPR RI, Komisi X yang baru. Jadi, kita *nggak* usah terlalu ngotot di sini, nanti akan berubah ini semua.

Jadi, ancap-ancang boleh saja, tapi kita harus mengharapkan anggaran Kementerian Pendidikan ini adalah sentral dari anggaran yang 20% itu. Jadi, jangan banyak di kementerian lain, harus paling besar anggaran itu di Kementerian Pendidikan Kebudayaan.

Jadi, sesuai dengan namanya, begitu. Jadi, anggarannya pas 20% itu paling banyak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Itu kita harapkan ke depan. Saya yakin itu akan terwujud. Apalagi pemerintah kita baru nanti akan *insyaallah* akan lebih baik tentunya.

Nah, kemudian kita lihat tadi anggaran untuk perguruan tinggi. Saya masih mengharapkan yang bisa kita ubah. Anggaran untuk PTN itu jauh, sangat tinggi dibandingkan dengan PTS, padahal jumlah PTN cuma 184. PTS ada 3.220, dan 67% mahasiswa Indonesia ada di perguruan tinggi swasta. Mereka adalah anak Indonesia, rakyat Indonesia yang juga harus dapat perhatian.

Jadi, bukan di PTN saja anak bangsa Indonesia, di PTS pun mahasiswa itu adalah bangsa kita. Jadi, perlu anggaran yang kita besarkan. Jadi, barangkali saya harapkan nanti dalam diskusi kita konsinyering, perhatian PTS ini perlu dibesarkan lagi, karena mereka adalah bangsa kita yang harus mendapatkan pendidikan yang cemerlang, walaupun mereka susah payah mencari dana sendiri.

Nah, kita lihat kejadian kemarin itu para pimpinan perguruan tinggi mencari dana dari mahasiswa. Ini sebenarnya harus pemikiran yang zaman dulu. Harusnya berpikirlah bagaimana bisa mencari uang tidak dari mahasiswa. Bagaimana caranya, kan sudah ada badan usaha. Kalau belum ada PT-nya, ya ada koperasi. Berapa banyak tambang? Apakah tambang batu bara, tambang perak, tambang nikel, Kenapa tidak direbut oleh rektor-rektor dengan badan usahanya? Kenapa harus kepada pengusaha-pengusaha yang baktinya pun tidak ada kepada bangsa ini, itu diberikan. Kenapa kita tidak? Manfaatkanlah ya. Wibawa menteri untuk meminta kepada Presiden, untuk mendapatkan usaha-usaha ini.

Jadi, jangan seperti Andalas, penonton untuk semen di Padang sana, ya mereka dapat abunya saja, kampus itu kan kena abu, asap, polusi dari pabrik semen itu. Jadi, diharapkanlah semua perguruan tinggi punya usaha, punya badan usaha, karena diizinkan. Kenapa harus dikasih kepada orang?

Mudah-mudahan ini ada perubahan. ke depan nanti seluruh rektor. Hendaknya menyontoh lah rektor-rektor perguruan tinggi swasta. Saya pernah jadi Rektor Perguruan Tinggi Swasta itu memikirkan gaji dosen, gaji pegawai yang gaji keamanan, gaji jaga malam itu di uang sendiri. Kalau Rektor PTN kan semua ada di negara, enak kerjanya. Jadi Rektor PTS ini perlu ya kita bantu mereka karena mereka pun susah cari uang dengan bantu dengan banyaknya fasilitas sebagainya.

Yang terakhir, saya terkejut melihat beberapa kali *screenshot* di HP. Tapi di berapa tempat, bukannya satu tempat, berapa provinsi, anak-anak kelas 6 dan SMP ditanyakan kali-kali. 5 x 7 berapa? Berapa ya? 8 x 6 berapa, ya? Ditanya oleh yang bertanya di TV itu, *nggak* tahu. Cemana pendidikan kita ini, ke mana jadinya? Saya terkejut, ini kan pelajaran SD saya dulu, kelas 4, kelas 5 kali-kali sampai berapa-berapa, ini anak SMP, 7x8, berapa ya, *nggak* tahu ya. Teman dia ditanyain, ketawa-ketawa.

Inilah bukti nyata pendidikan kita. Ini yang dari tanggung jawab besar kita ini, bagaimana bangsa kita ke depan nanti dengan modal seperti ini. Saya khawatir.

Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Terima kasih, Pak Johar.

Pak Yan, silakan Pak Yan.

F-P GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih.

Pimpinan rapat yang saya hormati beserta seluruh rekan-rekan Komisi X, Pak Menteri Pendidikan beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Saya mungkin ada beberapa catatan kritis terkait dengan rencana anggaran atau rencana kerja Kementerian Pendidikan tahun 2025. Pertama, terkait dengan persoalan PPK, Pak Menteri, di data saya ini kurang lebih PPK yang baru berhasil direkrut pemerintah melalui skema PPK kurang lebih sekitar 794.724 orang sampai dengan tahun 2024.

Ini tentunya masih jauh dari target atau harapan yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan, yang kurang lebih mencapai angka 1.312.759 guru ASN. *Nah* saya pikir, pekerjaan rumah yang tersisa ini sekiranya menjadi peraturan pemerintah dalam desain dan rencana anggaran di tahun 2025 nanti. Mengapa demikian? Karena masih banyak daerah-daerah 3T yang masih membutuhkan tenaga guru.

Selain itu, dari hasil kunjungan dan pantauan yang selama ini kami dapati, khususnya di daerah, antara lain, misalnya banyak guru-guru yayasan maupun madrasah yang sudah mengabdikan diri sekian tahun, tapi tidak melalui proses verifikasi yang baik dalam proses pengangkatan guru, PNS. Ini juga harus perlu mendapat perhatian. Sedangkan, banyak sekali siswa-siswa kita yang tersebar di sekolah-sekolah yayasan maupun sekolah-sekolah swasta. Saya pikir ini perlu menjadi catatan, karena kita bicara soal kesetaraan pendidikan, keadilan dalam akomodasi anak-anak Indonesia dalam pendidikan, maka sekolah-sekolah swasta juga perlu menjadi catatan dan perhatian pemerintah.

Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah kekerasan di sekolah-sekolah, baik yang terjadi di level SMP, level SMA, tapi juga sekolah-sekolah kejuruan. Sampai sekarang, kalau saya mengamati dan mengikuti dan mencermati, dari tahun 2021-2022 sampai dengan saat ini kurang lebih penurunan baru mencapai sekitar 2, sekian persen.

Nah ini juga mungkin menjadi catatan dari pemerintah untuk bisa mendapatkan perhatian khusus, sehingga kekerasan di sekolah-sekolah bisa ditekan melalui sistem pengawasan pendidikan yang lebih relevan ya, dengan berbagai macam kurikulum dan standarisasi pendidikan yang berlaku mulai dari SD, SMP, sampai dengan Perguruan Tinggi.

Dan tentunya kekerasan itu kategorisasi kebanyakan terjadi di SMP, SMA dan sekolah-sekolah kejuruan. *Nah* ini saya berharap ke depan mungkin bisa ditekan lagi dari 2,96 penurunan angka kekerasan, dari total 68,25% tahun 2021, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik.

Nah kemudian yang ketiga, terkait dengan masalah literasi. Saya pikir, isu literasi ini menjadi fokus juga dari Kementerian Pendidikan untuk alokasi dan anggaran dan peningkatan literasi di tahun 2025. *Nah* tentunya dari pengamatan saya bahwa literasi kita baru 40-70% capaian kompetensi siswa yang saat ini dicapai oleh Kementerian Pendidikan.

Dan mungkin sisanya ini akan menjadi PR untuk peningkatan kompetensi siswa di bidang literasi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan strategi percepatan. Kenapa dunia digitalisasi kita dan pengembangan sarana-prasarana infrastruktur sampai ke daerah-daerah 3T. Tentunya salah satunya adalah bagaimana bisa menjangkau keadilan dan di bidang pendidikan, khususnya bagi para siswa tapi juga para guru di bidang literasi.

Sehingga saya berharap, mudah-mudahan beberapa isu ini selain masih ada isu-isu lain yang mungkin sudah diapa programkan oleh Kementerian Pendidikan sendiri, sekiranya itu bisa menjadi perhatian. Agar ke depan nanti ada keadilan bagi pendidikan kita di Indonesia, baik di daerah-daerah 3T tapi juga daerah-daerah yang terjangkau dan terpusat.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Yan.

Pak Yan, nanti yang Kemenpora harus hadir ya, karena Bapak kan klub sepak bola.

Berikutnya, dari Gerindra sudah, saya bergeser ke Nasdem Ibu Lisda oh, Mbak Ratih.

F-P.NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKSRRU., M.Si.):

Sedikit pimpinan nanti setelahnya akan diperdalam oleh Kak Lisda terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi X,
Mas Menteri beserta seluruh jajaran,**

Semoga sehat selalu semuanya *insyaallah, amin.*

Saya langsung saja dan tidak akan lama, *insyaallah*. Yang pertama, di halaman 11, itu mohon kami bantu diingatkan terkait target APK perguruan tinggi berdasarkan RPJMN 5 tahun lalu dan juga 5 tahun mendatang. Karena kalau kita merujuk dari data yang dipaparkan seperti di halaman 11 tersebut, itu hampir tidak ada perkembangan sama sekali, bahkan setelah ratusan ribu KIP sudah disalurkan.

Nah pertanyaannya setidaknya ada dua di sini. Pertama, yaitu ini datanya ini bersumber dari Kemendikbud atau dari BPS? Dan yang kedua, apa evaluasi dari stagnasi angka partisipasi kasar ini?

Lalu berikutnya, kami juga melihat pada saat kami membedah bahan dari teman-teman dari Kemendikbud, agak tidak masuk akal untuk saya kalau anggaran 2025 yang dikelola oleh Kemendikbudristek itu boleh dikata turun hampir Rp15.000.000.000.000 dibandingkan di tahun 2024.

Nah ini indikasinya antara APBN kita secara keseluruhan berkurang cukup besarkah atau memang alokasi dana pendidikan 20% dari APBN yang dikelola oleh Kemendikbutristek ini semakin kecil. Sedangkan kita di Komisi X pun saat ini betul-betul sedang memperjuangkan agar anggaran untuk Kemendikbudristek itu bisa dari 20% itu bahkan setengahnya kita pengen itu nyemplung dan dikelola oleh Kemendikbutristek itu sendiri. Bahkan sampai kita membikin panja biaya pendidikan tersebut. Karena memiliki kekhawatiran dengan turunnya anggaran ini, jangan sampai cita-cita Indonesia emas itu tergantikan oleh Indonesia Cemas, itu yang kita khawatirkan, gitu.

Jadi mungkin ini, Kang Dede, salah satu perhatian dari saya. Selebihnya akan ada pendalaman lagi dari Kak Lisda.

Terima kasih banyak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Kak Lisda.

F-P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI., S.E., M.MTr.):

Terima kasih pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi X,
Yang saya hormati Mas Menteri beserta jajaran,**

Langsung saja, mungkin untuk kalau kita melihat bahwa amanat undang-undang itu ada minimal 20% anggaran memang untuk pendidikan, tapi kenyataannya permasalahan kita selalu di anggaran. Artinya, memang di sini kalau kita melihat banyak sekali anggaran-anggaran itu yang memang tidak langsung kepada kebutuhan-kebutuhan yang langsung kepada siswa ataupun pada penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.

Nah, di sini karena adanya panja biaya pendidikan ya, mungkin di sini kesempatan juga untuk kita bersama-sama bisa melakukan sesuatu di penghujung jabatan kita, yang di sini ya. Semoga ke depannya ini ada jalan keluar terbaik. Tentunya, harus lebih banyak lagi yang harusnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan.

Kemudian, untuk program-program prioritas Kemendikbud di tahun lalu ya sampai sekarang ini, begitu mengenai digitalisasi pendidikan, *platform* Merdeka Belajar, dan lain-lain, kemudian PIP-KIP. Saya berharap bahwa di sini terus dapat dipertahankan karena ini program sangat membantu masyarakat kita, yang susah dalam mencapai pendidikan ini dan meringankan beban keluarga yang kurang mampu. Tentunya ini harus bisa kita pertahankan, dan juga kita harapkan bahwa PIP-KIP ini prosesnya dapat dimudahkan aksesnya, dan tentunya harus tepat sasaran.

Dan terkait dengan pendidikan tinggi, penerapan Kampus Merdeka ini saya melihat bahwa ini sudah sangat baik, bahwa ada 937.339 siswa yang sudah mengikuti. Ya tentu ini kita melihat bahwa adanya pengalaman belajar, pengetahuan, penambahan *skill*, kemudian jejaring yang mereka dapatkan di dunia usaha ataupun industri dan juga dengan masyarakat, sehingga ini program bagus dan harus terus didorong. Begitu juga dengan program Guru

Penggerak.

Kemudian, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi, bantuan beasiswa harus terus ditingkatkan. Karena kebutuhan kelanjutan pendidikan di perguruan tinggi ini adalah kebutuhan primer. Jadi, jangan kita menganggap ini adalah kebutuhan yang tersier. Karena kalau kita ingin mencapai cita-cita menuju Indonesia Emas, tentu harus kita anggap ini adalah kebutuhan yang primer.

Satu hal penting lagi, Mas Menteri, menurut kami yang harus diperhatikan Kemendikbudristek ini adalah pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Karena harus menjunjung tinggi etika, moralitas, akhlak, dan nilai-nilai luhur, jangan sampai anak-anak kita berpengetahuan tapi tidak bermoral.

Dan selain itu, persoalan yang sangat *crucial* bagi generasi muda saat ini yaitu *fighting spirit* mereka. Kalau kita mendengar sekarang ini ada istilah "generasi rebahan". Jadi, mereka itu manja, suka yang praktis, *mager*, malas gerak. Tentu di sini harus ada peran kita untuk membekali dan mendukung mereka dengan pendidikan-pendidikan yang tepat untuk mendukung kesuksesan mereka di masa yang akan datang.

Kemudian, selanjutnya saya menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya ini pertama pada program KIP kuliah, Mas Menteri. Bahwa ASN dan juga masyarakat menengah yang kita anggap mereka ini sudah mampu untuk bisa menguliahkan anak-anaknya. Tapi ternyata di lapangan kami menemukan mereka juga kesulitan.

Jadi ASN dengan level tertentu, itu mereka sangat kesulitan. Untuk menguliahkan satu anak saja ternyata mereka juga sudah sulit, apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Mungkin ini menjadi masukan untuk kita untuk dicarikan jalan keluarnya. Karena kalau KIP itu kan hanya diberikan non-ASN kan, *nah* tapi ternyata mereka butuh.

Dan yang satu lagi, pendidikan inklusif kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ringan. Jadi, kalau anak-anak kita berkebutuhan khusus berat, itu sekolahnya sudah jelas, SLB misalnya atau yang tidak berkebutuhan, ya pastinya di reguler. Tapi ini yang berkebutuhan khusus ringan. *Nah* ini terus terang terjadi pada anak saya sendiri, Mas Menteri, untuk mencari sekolah inklusi ini susah sekali. Jadi, ada pembatasan setiap sekolah itu hanya dua anak misalnya. Sementara, kita berharap bahwa anak kita dapat sekolah di lingkungan terdekat dari rumah.

Sehingga ini minta tolong diberikan perhatian khusus ya, supaya anak-anak kita ini juga mendapat kesempatan untuk dapat bersekolah, walaupun dengan, apa namanya, guru pendamping atau sarana yang lainnya.

Demikian, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI/WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, terima kasih Bu Lisda.

Berikutnya dari PKB. Puang, Puang. Silakan, Puang.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY., M.Si):

Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta jajaran,

Alhamdulillah, ini kan baru *highlight* sebetulnya, kita belum mendalami secara intens untuk yang akan datang. Saya tertarik sekali, di sini kementerian pendidikan ristek ini ada 38 penghargaan. Selamat, 38 penghargaan, 4 halaman itu jadi di buku ini.

Itu sebetulnya sebuah *legacy* bahwa kementerian ini memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan kepada masyarakat bangsa ini di tengah suara-suara kritis yang tentu saya tidak semuanya benar di luar sana bahwa pendidikan kita tidak sedang baik-baik saja. *Nggak* usahlah kita sampai kepada komentar Rocky Gerung yang *quote-quote* itu yang terlalu kurang ajar.

Misalnya, mengatakan bahwa IQ bangsa Indonesia saat ini, bisa dilihat ada semua di mana-mana, satu tingkat di bawah simpanse, itu kan kita tersinggung, di Komisi X ini juga, itu, iya. Di atas simpanse sedikit, itu kan saya *nggak* mau melihat itu dari perbandingan apa yang kita sudah lalui, kerjakan selama minimal 4,5 tahun bersama Bapak Menteri beserta jajaran itu.

Intinya, saya ingin mengatakan bahwa Masih banyak persoalan-persoalan pendidikan, baik yang disampaikan teman-teman, maupun apa yang kita baca alami dan kerjakan, terutama di Dapil. Daerah-daerah legok, tersier, itu masih mengalami hal-hal yang sangat memungkinkan. Saya tidak tertarik lebih jauh, tapi saya ingin melihat wanti-wanti saja. Ucapan selamat juga bahwa kemarin sudah diketok Undang-Undang Bahasa Daerah.

Meskipun yang mengusulkan ini Prof-prof, apa namanya, bukan dari Komisi X, tapi dari anggota MPR, apa namanya, fraksi daerah. Tapi tentu saja untuk implementasinya nanti di kita, di Komisi namanya Komisi Peradaban ini. Yang sebut-sebut Undang-Undang Bahasa Daerah kan sudah disebut, kemarin sudah diketok di Paripurna.

Nah, untuk itu saya lebih jauh akan ke halaman, selintas saja ke halaman 40 tentang program literasi bahasa dan kesastraan. Di poin 2 itu ada perlindungan bahasa daerah. Ini penting sekali, karena yang tadi itu akan

masuk UNESCO. Mudah-mudahan ada pembelajaran tambahan di kelas SD kita nanti, ada muatan tambahan bahasa daerah, itu yang belum disampaikan di rancangan ini. Ada muatan tambahan, bagaimana kita mengadvokasi skema undang-undang itu nanti tapi belum dituangkan.

Menarik sekali, bahwa Bu Menteri Keuangan, Bendahara Negara kita mengatakan bahwa APBN yang ada sekarang ini adalah APBN Transisi. Turunannya kan nanti juga di RKA-K/L yang kita akan bacakan sekarang, apa yang diputuskan sekarang untuk 2025 nanti kan dikerjakan oleh pemerintahan baru. Yang tentu saja muatan, isinya, programnya, mungkin ada bersamaan, ada juga yang tidak bersamaan, sisi persamaan. Itu yang saya maksud.

Karenanya, misalnya di halaman 45, poin 25 pointers 25 itu, buku pendidikan dan buku umum yang dikembangkan, dinilai, dan diawasi. *Nah*, baru minggu kemarin kita geger seluruh bangsa ini, buku-buku yang ada, Pak Menteri juga pasti tahu, sudah sampai dengar laporannya, dari MUI, semua ormas-ormas kemasyarakatan keislaman memprotes, masuknya buku-buku yang sangat luar biasa dahsyat itu tentang LGBT. Tentang itu, wah luar biasa, saya membaca itu ngeri, buku-bukunya kok bisa lolos? Bisa lolos, itu betul-betul saya *nggak* masuk akal, Pak. Ya sudah, saya karena ada kita atau Pak, kemarin Kang Dede mengirimkan itu di tempat, di grup itu ada semua itu per item, dikutip per halaman. Hih, ngeri, itu-itu, kenapa itu bisa lolos?

Karenanya ini wanti-wanti saja untuk Bapak yang mengampu bahasa ini, apalagi di sini sebutkan diawasi. Sama dengan di halaman 46, poin 26 itu disebutkan pengawasan pemanfaatan Buku Sastra Pendidikan, di Satuan Pendidikan. *Nah*, ini betul-betul karena apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu dimulai dari masa dini sebetulnya, pendidik masa dini.

Kalau tingkat perguruan tinggi nanti itu kan sudah tinggal pengembangan dan seterusnya. Ini betul-betul saya minta pengawasan tentang yang sifatnya literasi, bahasa, kesastraan, perlindungan bahasa itu menjadi fokus perhatian saya. Mumpung komisi ini sering disebut sebagai komisi peradaban. Kalau dari sini saja lahirnya tidak beradab, apa yang terjadi di luar? Itu dua hal yang ingin saya sampaikan.

Sebetulnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin sudah selesai atau akan selesai sebelum rapat ini dilaksanakan, menyangkut PIP. Karena baru dua hari lalu saya kembali dari daerah, setelah, saya sampaikan saja, setelah yang sudah terjadi itu sudah ada, apa namanya? Eksekusi dari dinas untuk yang kemitraan, yang menyangkut pengawasan kita kok belum. Orang-orang tuh bertanya, kapan, kapan, kapan dibuka, kapan dibuka.

Nah, untunlah sampai kemarin malam, tengah malam Pak ya, subuh sudah ada. Kami betul-betul digugat oleh TA-TA kami, apa yang terjadi sesungguhnya di Komisi X tentang maksudnya PIP ini yang terjadi. Ya *nggak* tahu saya, saya *nggak* mengerti juga struktur birokrasi pemerintahan apa anggota DPR kok dievaluasi oleh dinas itu, diverifikasi oleh dinas itu. Di mana masuk akalnya itu? Ya, model baru, *nggak* mungkin Pak, terjadi. Kita belajar dengan pemerintahan birokrasi, *nggak* mungkin. Masa dinas mengawasi yang

namanya DPR, Bu. Itu jadi tertawaan kita di luar sana.

Nah, karenanya saya mungkin ada solusi nanti disampaikan nanti kepada kita semuanya, bahwa ini jangan sampai terjadi. Tentu saja, kita paham betul terus terang saja, ya KPK intervensi dalam hal ini. Mestinya hubungan KPK itu dengan Kementerian, bukan dengan Anggota DPR yang pemangku masyarakat ini. Bukan dengan kita. Aspirasi bukan dengan kita, tapi dengan Kementerian. Dalam hal ini Pak Menteri lah. Bagaimana caranya mencari solusi itu? Karena kita tuh sama-sama memperjuangkan dapil masyarakat yang kita wakili. Tak mungkin. Kepala dinas-dinas di daerah, kita yang dapat suara 120.000, diawasi oleh seorang Kepala Dinas. Ya, kalau kepala dinas-dinasnya sama-sama partainya misalnya, PKB.

Tapi kalau bukan Kepala Daerah, bukan PKB, Pak Menteri. Contohnya saya sampaikan, kalau bukan PKB kepala dinasnya, kalau bupatinya, selesai kita dan sudah terbukti kemarin dicoba. Ada yang mengusulkan 80, yang dicenteng cuma 6 kita mengusulkan berapa, 200, yang dicempotkan cuma 20. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kita lakukan selama ini sebetulnya? Pak Menteri sudah 4 setengah tahun meninggalkan *legacy* itu bagus, kenapa di ujung timbul Gara-gara seperti ini? Ini yang tidak masuk akal kita semuanya.

Kalau Pak Menteri syukurlah, meskipun dua tahun yang lalu sudah ingin mengundurkan diri, kami masih lima tahun lagi Pak terpilih kembali, digugat oleh apa namanya dapil kami, orang-orang tokoh dapil.

Ini mohon maaf saya sampaikan ini semua dari lubuk hati yang paling dalam. Karena bagaimanapun juga, kita duduk kembali di sini, mereka-mereka itu lah memberikan perhatian, memberikan apresiasi, ada namanya aspirasi dari Bapak. *Nggak* apa-apa saya sampaikan disini, walaupun teman-teman yang lain, jangan terlalu risih menyampaikan itu.

Kenapa kita risih? Dari situ lah kemungkinan orang tertarik dengan kita, bahwa orang yang terpilih itu mendapatkan legitimasi karena berbuat untuk masyarakat, berbuat untuk rakyat di bawah itu Pak, intinya.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI/WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, teman-teman saya mengingatkan. Ini sudah jam 1, di ruang depan sudah ada Menparekraf untuk berikutnya.

Saya perpanjang 15 menit saja sampai Mas Menteri memberikan jawaban setuju ya, karena kan kita masih ada waktu, nanti pendalaman bisa berhari-hari itu.

Baik.

f

(RAPAT: SETUJU)

Silakan anggota lain mungkin per 3 menit, Ibu Anita.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI., S.H.,M.H):

Izin-izin Pimpinan, sedikit saja.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI/WAKIL KOMISI X DPR RI):

Pak Dafi, silakan Pak Dafi.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI., S.H.,M.H):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan juga yang saya hormati seluruh Anggota DPR RI Komisi X yang saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajarannya,

Jadi langsung saja berkenaan dengan beberapa catatan saya. Yang pertama adalah berkenaan dengan turunnya anggaran di Kemendikbudristekdikti yang cukup luar biasa, turunnya sekitar 15.000.000.000.000. Tadi juga kita menyampaikan di Badan Anggaran berkenaan dengan turunnya anggaran tersebut. *Nah* ini menjadi harapan kita bersama, bagaimana kita bisa mendorong kembali anggaran ini bisa sesuai dengan *baseline* yang diharapkan oleh Kemendikburistekdikti.

Karena di Kemendikbud ini adalah seperti disampaikan oleh Puang Andi tadi, di sini adalah komisi peradaban. Tentunya kita mempersiapkan pemegang estafet perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Maka anggaran yang dialokasikan itu adalah bagian daripada investasi Indonesia untuk masa depannya. Ini menjadi catatan kepada kita semua, karena masih banyak PR-PR lain yang harus kita selesaikan.

Di mana masih banyak guru-guru honorer yang mengharapkan kepastian hukumnya. Belum lagi ini perlu diketahui juga, ternyata di daerah juga pengangkatan guru honorer itu *nggak* seperti yang kita bayangkan. Untuk perpanjangan izin mereka saja itu sampai ada pungutan-pungutan. Kita seram agak agak sedikit miris melihat, masa seorang guru untuk memperpanjang izinnya harus dimintai pungutan. Kan ini *nggak* benar. Gurunya membayar pun kan ini menjadi bagian dari perbuatan tercela. *Nah*, ini menjadi catatan kita semua.

Belum lagi saya melihat juga ada penurunan anggaran di beberapa, di Kemendikbudristekdikti. Oleh karena itu, sangat tepat untuk kita dorong kembali anggarannya bisa naik. Jangan sampai terjadi nantinya efisiensi sana-sini. Akhirnya memperbaiki, ya ibarat kata, kain yang kurang lengkap, tarik ke atas kelihatan kakinya diturunkan ke kaki juga tidak kelihatan pusatnya, kan begitu. Ini menjadi catatan kepada semua.

Mudah-mudahan, dengan perjuangan dan niat tulus kita semua, *insyaallah* anggaran di Kemendikbudristekdikti ini bisa kita optimalkan dan juga bisa kita yakinkan untuk bisa berjalan dengan semaksimal mungkin.

Terima kasih. Saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Berikutnya dari Demokrat.

Silakan Bu Anita.

F-P.DEMOKRAT (ANITA JACOBA GAH., S.E.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Pertama-tama, kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya, 15.000.000.000.000. Tetapi, kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri, anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024, apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangnya kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak melakukan menggunakannya dengan baik.

Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri, berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru? Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos PPPK, sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK.

Kedua, guru-guru daerah terpencil, masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai, padahal dari 2021 anggarannya. Ada saya kasih contoh, di Kabupaten Kupang, ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan.

Mau lagi? Kita lihat lagi dana-dana PIP. *Nah* makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa? Kami Dewan sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan laporkan kepada kami, tapi kami tidak pernah didengar, ya kan?

Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan, diatur lagi, mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau *nggak* dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan dilakukan, harus dilakukan verifikasi oleh dinas.

Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat, kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai Kementerian mau *nggak* diverifikasi sama dinas? Bapak-Ibu ini kan orang-orang pintar, setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan, kok bisa salah mengambil kebijakan?

Bu Sekjen, Anda mengenalkan Persekjen, yang di mana di poin nomor tiga dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B, diverifikasi oleh dinas pendidikan. Loh kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang, operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah.

Kepala sekolahnya kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi, yang dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga tidak tahu, Kementerian juga. Jadi, kalau mau lakukan verifikasi, harusnya Kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik.

Bahkan saya minta, Bapak-Ibu Pimpinan, kita memberikan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan. PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa! Dari 2021, 2022, 2023. *Nggak* usah tanpa anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis. Bukan untuk rakyat.

Saya marah, Pak Menteri, untuk kesekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang disuruh kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau sebagai Menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh, lah. Kalian itu dipilih oleh Presiden. Harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat.

Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh Presiden yang baru. Semoga Presiden yang baru memperhatikan kinerja Kementerian sekarang ini. Memperhatikan Eselon-Eselon I yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal, tetap tertinggal, yang guru menangis, tetap menangis.

Bicara *platform* digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak, daerah-daerah yang sudah ada internetnya, diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya, dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut, saya

tidak tahu. Tapi saya Puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali.

Dan sampai ini, apa pun yang terjadi, kita yang terpilih kembali kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi, jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih, itu adanya di dapodik sekolah.

Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah atau mereka? Jangan begitu, dong.

Bikin persekjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih, kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP bagaimana, Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak.

Mari kita buktikan, mau kita turun? Kita buktikan. Kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau *nggak* lihat itu orang tua punya air mata.

Omong kosong! Nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Jadi, kalau kita mau bicara soal anggaran Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya, sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin.

Jadi, kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat kalau mau melihat bangsa ini baik dan lebih maju.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, terima kasih.

Saya tidak akan bertanya, karena sudah diwakili oleh Ibu Anita. Saya lanjut kepada berikutnya Fraksi PKS.

Silakan, Habib Fahmi.

F-PKS (Dr. H. FAHMI ALAYDROES., M.M., M.Ed):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama, saya juga ikut prihatin terjadinya penurunan anggaran yang cukup signifikan untuk pagu indikatif yang kita terima, yang kita dengar. Padahal kita sedang menghadapi problematika yang cukup serius, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa kita adalah bangsa besar bangsa yang bercita-cita ingin menjadikan anak-anak bangsanya memiliki peradaban yang tinggi.

Oleh karena itu, saya memberikan catatan di tengah prihatinnya penurunan anggaran ini, maka ini menjadi semacam isyarat buat kita khususnya bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dikti. Bahwa apa yang kita inginkan bersama-sama untuk mencapai cita-cita besar tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Maka kemitraan bersama berbagai pihak itu menjadi keniscayaan.

Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan ke depan kemitraan yang terjalin antara Kemendikbud bersama Komisi X itu harus semakin progresif dan semakin efektif. Dan bukan hanya bersama Komisi X, tapi juga tidak bisa kita pungkiri, pada akhirnya penyelenggaraan pendidikan itu diselenggarakan di daerah-daerah. Di mana pimpinan-pimpinan pemerintah daerah menjadi penentu seberapa efektif sekolah-sekolah kita berjalan bekerja.

Jadi kemitraan dengan pemerintah daerah juga menjadi sebuah keniscayaan dan harus ditingkatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepada masyarakat penyelenggara sekolah. Karena kita tahu bahwa Menteri Pendidikan kita adalah Menteri Pendidikan Nasional, bukan Menteri Pendidikan Negeri. Dan kita juga paham bahwa pihak swasta atau masyarakat sudah sejak dahulu kala, bahkan sudah 100 tahun berkiprah di negeri kita untuk berkontribusi dan ikut berpartisipasi di dalam rangka dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemarin, kami bertemu dengan para penyelenggara pendidikan tinggi dari ormas-ormas, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Ternyata luar biasa. Dan kalau kita pahami, pendidikan tinggi swasta itu lebih dari 90 % dan pendidikan dasar menengah sekitar 28 %. Artinya, kemitraan dengan pihak swasta itu juga menjadi sebuah keniscayaan.

Yang keempat, juga tidak kalah pentingnya adalah kemitraan dengan orang tua. Kita ingat apa yang menjadi doktrin tripusat pendidikan. *Nah*, dalam hal ini saya juga ingin mendorong kepada Kemendikbud untuk lebih mengefektifkan dan mengaktifkan posisi dan peran komite-komite sekolah. Karena keberadaan komite sekolah ini bisa menjembatani antara sekolah dengan orang tua di dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan. Jangan sampai keberadaan komite ini hanya sebatas kewajiban saja, tetapi benar-benar harus ada panduan dan harus ada pembinaan yang sangat jelas.

Dan terakhir, kemitraan terhadap media. Hampir banyak peneliti menyebutkan bahwa apa yang sudah kita didik di sekolah sering kali ambruk atau rusak karena pengaruh media. Oleh karena itu, kemitraan antara Kemendikbud dengan kementerian-kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan kontrol media, menurut saya ini juga harus menjadi niscaya, harus menjadi catatan agar ke depan apa yang kita inginkan pendidikan nasional kita bermutu itu menjadi lebih terkawal bersama, itu yang pertama. Sedikit lagi.

Yang kedua, kenapa saya sebutkan berbagai macam kemitraan itu? Intinya adalah bagaimana anggaran pendidikan kita yang tidak besar-besaran amat padahal sesungguhnya 20% itu besar. 52% mengalir ke daerah, itu kan dahsyat sekali. Kemudian pada kenyataannya, saya melihat di dapil saya saja, itu masih banyak sekali temuan-temuan prihatinnya kondisi sekolah kita. *Nggak* usah jauh-jauh lah, dekat sekali satu jam dari Ibukota masih banyak sekolah, saya *nggak* bicara sekolah swasta, sekolah negeri SD, SMP, itu masih banyak yang tidak layak. Sempit ruangnya, rusak kondisi kelasnya, sehingga tidak memungkinkan anak-anak kita selama 6 tahun berada di sana. Kemudian bisa mengharapkan mereka mendapatkan pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu. Ke mana uang yang mengalir ke daerah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman? Ini barangkali yang perlu dikawal, supaya sekolah-sekolah kita mendapatkan layanan, fasilitas yang memadai.

Belum lagi yang terkait dengan guru. Saya mendapatkan data dari hasil riset IDEAS, lembaga riset di bawah Dompot Dhuafa, 42 % dari guru-guru kita itu bergaji kurang dari 2.000.000, 13% kurang dari 500.000, 74% guru honorer dan kontrak itu digaji di bawah 2.000.000, 20,5 % kurang dari 500.000, 79,8 % dari guru-guru kita pasti punya pinjaman dan kita tahu data pinjaman online pinjol ilegal itu didominasi 42% oleh guru.

Artinya, tingkat kesejahteraan guru kita masih jauh dari yang seharusnya. Bagaimana kita akan bisa meningkatkan mutu pembelajaran, ketika ruang-ruang kelas masih sangat sederhana, guru-guru kita juga punya tingkat kesejahteraan yang sangat sederhana? Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan dengan situasi dan kondisi seperti itu, kemitraan yang tadi saya sebutkan di awal, itu benar-benar bisa berjalan efektif. Saya tidak yakin kalau Kementerian Pendidikan Kebudayaan bisa menyelenggarakannya seorang diri. Kemitraan adalah keniscayaan, karena yang kita hadapi adalah problematika yang sangat besar.

Demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI/WAKIL KOMISI X DPR RI):

Bu Ledia.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH., S.Si.,M.Psi.T):

Baik, terima kasih pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan anggota Komisi X yang berbahagia,
Mas Menteri beserta seluruh jajaran,**

Pertama, terima kasih atas penjelasan presentasi terkait dengan RAPBN 2025 berikut semua kelengkapan yang kita perlukan. Kedua, dalam hal presentasi, nampaknya memang teman-teman yang membuat presentasinya perlu lebih merapikan karena ketika presentasi. Sebaiknya memang indikatornya sama ada yang disebutkan misalnya dari 2020 sampai 2023, ada yang cuma di 2023 saja. Itu sebenarnya teknis, tetapi teknis itu akan memudahkan kami untuk membacanya, apalagi dapatnya baru sehari sebelumnya.

Kemudian hal berikutnya terkait dengan berbagai regulasi yang selama ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, tentu kami melihat ada hal-hal yang perlu dicatatkan. Yaitu bagaimana kita melakukan uji publik sebelumnya, setidaknya ada *pilot project* baru kemudian kita melihat, jangan kemudian *testing the water*.

Ada beberapa kasus kemarin kan terjadi. Saya ini muridnya Pak Hamid, belajar soal *forecasting* kebijakan publik. Jadi saya kalau belajar sama Pak Hamid, mudah-mudahan juga kebijakan-kebijakan yang lain juga sama dikawal juga oleh Pak Hamid, agar kemudian tidak seperti *testing the water*.

Saya punya beberapa catatan yang tidak perlu dijawab hari ini, tapi dijawab pada saat kita konsinyasi. Pertama, buat kami Paud Dikdasmen itu harusnya jadi inti, karena ini adalah memastikan kualitas pendidikan dasar menengah. Sehingga, Pak Iwan, kita perlu memastikan ada ketersambungan antar dirjen Paud Dikdasmen dan Dirjen GTK juga dengan Dirjen Vokasi supaya apa, supaya nanti kualitasnya tuh betul-betul bisa terpenuhi.

Rata-rata lama belajar kita yang masih 8,6 tahun itu, itu menjadi catatan. Artinya, masih punya banyak PR. Yang juga saya khawatirkan, sebagaimana tadi Habib Fahmi sampaikan, persoalannya adalah 52% anggaran ke daerah. Bagaimana cara kita mengontrol? Sementara, Dikdasmen itu *heavy*-nya ada, bobotnya beratnya adanya di daerah.

Jadi, memastikan itu bisa berkualitas, kita menuntut di pusat harus berkualitas. Pak Nino bikin asesmen bolak-balik, bolak-balik kalau tidak diimplementasi di daerah itu akan menjadi sangat sulit. Karenanya kita perlu memikirkan apa yang bisa membuat daerah punya kesadaran, punya *awareness* yang lebih baik untuk peningkatan kualitas ini.

Kedua, berkaitan dengan GTK, Prof. Nunuk, menurut saya ketika kita mau bicara pendidikan dasar menengah yang berkualitas, makanya PR besarnya adalah siap *nggak* gurunya. Selain tadi pemerintah daerah, tapi juga gurunya. Meskipun sudah ikut Sekolah Penggerak yang terus kemudian nanti akan melakukan, apa sih istilahnya? Pembiasaan apa, pengimbasan ke daerah ke teman-teman ya maaf, tetapi dengan tuntutan mereka untuk menjadi guru.

Contoh mereka harus membangun lingkungan dulu di sekolah sebelum akhirnya keluar. Ini menjadi sebuah PR besar, sebuah pekerjaan rumah besar, karena saya mendapati bahwa tidak semua guru, bahkan di kota besar itu memahami sebenarnya maunya seperti itu harusnya seperti apa. Sehingga, akhirnya ya sudah seadanya saja, seadanya kelihatannya belajarnya di luar, kelihatannya asyik, tapi itu tidak mendapatkan substansinya.

Sehingga, cuma memindahkan belajar dari dalam kelas ke luar kelas, dan kemudian ya pokoknya diisi aja, dikejar aja target-target. Padahal, itu menurut saya ini jadi PR besar, apalagi anggarannya di 2025 turun 57%, tinggal 57% dari sebelumnya. Jadi, menurut saya ini jadi PR besar yang kayaknya menurut saya tetap akan berkeras bahwa menurut saya kebijakan tata kelola kelas, terutama di sekolah dasar dengan kondisi yang sekarang tetap memerlukan guru bimbingan konseling. Sementara ini, semua dibebankan kepada guru kelas. Guru-guru kelas tidak mungkin menanganinya. Meskipun kita tahu guru kelas harus mampu memberikan pendampingan kepada siswa, tetapi mereka bukan konselor. Itu nanti akan menjadi tambahan beban bagi guru kelasnya. Jadi, tetap harus ada ditambahkan berkaitan dengan itu.

Kemudian, juga pada Bu Kiki, vokasi. Karena dia masih punya sekolah menengah vokasi maka diperlukan SMK yang tadi semestinya jadi lebih perhatian kita SMK PK dan *teaching factory* itu malah turun. Kan kita punya klasifikasi anak yang bisa melanjutkan pendidikan dan anak yang disiapkan untuk bekerja. Pilihannya adalah bagaimana kemudian kualitas kerja ini bisa menjadi lebih baik. Mau tidak mau, mau tidak mau *spending*-nya pengeluaran untuk vokasi itu jauh lebih tinggi daripada yang reguler. Sepakat ya, Bu Kiki?

Tetapi persoalannya kita tidak melakukan itu. Biarpun Presiden mengatakan kerja, kerja, kerja, kalau *nggak* ada *skill*-nya, *nggak* bisa. Maka, ini harusnya disiapkan betul berkaitan dengan vokasi ini. Dan saya punya catatan, kita belum punya sekolah vokasi yang inklusif yang siap untuk membuat anak-anak inklusif siap bekerja. Mungkin dari mereka tidak bisa dipaksakan untuk kuliah, tapi mereka bisa dilatih untuk bekerja agar mereka mandiri.

Selanjutnya, di Badan Bahasa, tadi dipresentasikan oleh Mas Menteri bahwa kemahiran berbahasa Indonesia kita meningkat. Tapi kita tidak mendorong peningkatan anggaran di Badan Bahasa. Kita baru mengenal tes kemahiran berbahasa Indonesia kan baru belakangan. Jadi kelihatannya memang meningkat, karena baru dites. Tapi kita belum melihat sejauh mana, sementara pengaruh bahasa-bahasa pergaulan itu sangat tinggi. Sehingga, menurut saya tidak tercermin terapresiasi hanya 59,51% dari anggaran

sebelumnya.

Kemudian Dikti, Prof. Aris, jadi kalau saya melihat persoalan di regulasi tentang Kampus Merdeka. Standar pelaksanaan Kampus Merdeka itu perlu didiskusikan dengan kampus. Karena beda kebutuhannya tiap program studi punya ada yang *prerequisite*, ada yang tidak.

Sehingga, ketika kemudian mereka bicara tentang konversi SKS, itu perlu didiskusikan. Artinya, punya regulasi yang lebih longgar tapi punya pilihan-pilihan bagi kampus. Saya mendapati ada mahasiswa-mahasiswa yang bisa menyelesaikan skripsi mereka pada semester keempat, meskipun mereka tetap harus kuliah, karena mereka punya prestasi dalam penelitian setahun tiga kali lomba internasional dan mereka selesai semua, menang semua. Sehingga kemudian kampus memberikan konversi. Sebagaimana Mas Menteri selalu mengatakan *nggak* ada orang punya prestasi, maka di konversi SKS-nya dapat selesai.

Tapi ada kampus lain yang juga mahasiswanya berprestasi internasional, *nggak* sengaja ketemunya di bandara, saya ngobrol. Pertanyaan saya sama, "dikonversi *nggak* prestasi itu?" ternyata *nggak*. Padahal, kan semestinya bisa dong, harusnya. *Nah*, yang begini kelihatannya mungkin perlu ada obrolan yang lebih panjang dan lebih dalam dengan kampus-kampus yang punya berbagai program studi dan pasti beda-beda itu.

Kemudian, pembicaraan tentang penggabungan PTS itu bukan persoalan mudah, karena masing-masing yayasan dan kemudian nanti kesulitannya adalah pada penerima bantuan pemerintahnya. Bagaimana kemudian pemadanan datanya, dari PDDIKTI-nya, dan lain sebagainya, karena banyak problem yang kami dapati di lapangan.

Kemudian, cermatan terkait dengan PPG. Dan yang sampai sekarang saya belum pernah dapat jawaban penelitian SEAMEO sudah dari tahun kemarin saya tanya, tapi belum ada jawabannya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan dengan SEAMEO itu? Dan penelitiannya benefitnya buat kita atau cuma sekedar diplomasi saja karena kita ada di ASEAN?

Terakhir Mas Nino, 5 tahun sudah melakukan asesmen nasional. Seberapa besar BSKP memberikan dorongan kepada sekolah untuk melakukan asesmen mandiri yang terstandar *nggak* tergantung sama asesmen nasional kalau udah mau asesmen nasional, biasanya grubukan tuh sekolah segala macam, supaya kelihatannya bagus.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI/WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH., S.Si.,M.Psi.T):

Tapi kalau mereka tidak mandiri, itu akan jadi sulit. Selesai terakhir, kok

f

ini, Kang Dede. Terima kasih.

Poin pentingnya adalah ayo besok dikerjain PRnya, gitu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Ya, silakan dari PAN, Ibu Dewi.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI., M.Si.):

Baik, terima kasih.

Ketua yang saya hormati beserta seluruh jajaran,

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Saudaraku Menteri beserta seluruh jajarannya,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas program PIP yang telah diluncurkan, sehingga banyak sekali siswa di Bengkulu mendapatkan bantuan dan memiliki semangat untuk bisa bersekolah, dan satu lagi juga bisa semangat untuk bisa punya cita-cita menjadi seorang sarjana.

Nah, kesempatan yang berbahagia ini juga, kami memohon kiranya Bu Sekjen bisa merealisasikan untuk bisa nantinya, bahwa datanya bisa terbuka. Saya terima kasih karena sudah ada rencana dan sudah dikerjakan, sebagian besar data sudah terbuka dan kita sekarang bisa mengusulkan kembali.

Dan ini merupakan kebahagiaan bagi kami, sehingga anak-anak kami, terutama di Bengkulu, karena saya wakil dari Bengkulu, bisa tetap didaftarkan untuk mendapatkan beasiswa. Dan juga mohon kiranya tidak perlu diverifikasi oleh apa namanya kepala daerah, karena saya percaya bahwa Kementerian memiliki data yang lebih baik, sehingga cukuplah dipercayakan kepada Kementerian Pendidikan.

Nah, Saudaraku yang berbahagia, saya juga ingin menyampaikan pada halaman 36. Saya ingin menanyakan, seperti yang lain menyampaikan, bahwa tidak perlu dijawab hari ini, yaitu tentang halaman 36. Yaitu tentang program dukungan manajemen, yaitu yang sebesar 20.153.523.987 itu 20.000.000.000, itu mohon kiranya bisa dijelaskan nanti dalam rapat yang akan datang.

Yang kedua, mohon kiranya juga bisa dijelaskan, di halaman 40 untuk pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kami melihat di sini bahwa ada bantuan *event*, yaitu *event* untuk perlindungan bahasa daerah, besarnya 397 dan anggarannya hanya Rp9.000.000.000. Bandingkanlah dengan *event* internasional dan diplomasi Bahasa Indonesia yang satu tapi anggarannya Rp7.900.000.000 sekian. Nah, ini mohon dijelaskan kenapa kok *ngejemplang* banget gitu ya.

Yang selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan soal di halaman, bentar satu lagi, yaitu untuk pendanaan prioritas pendidikan tinggi, yaitu soal penelitian. Banyak sekali keluhan dari para dosen kita, penelitian ini sulit sekali dilakukan karena uangnya *nggak* seberapa, maksudnya bukan *nggak* seberapa ya. Uangnya yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tetapi rumit untuk pelaporannya dan memakan waktu melebihi dari penelitiannya.

Masalahnya, tukannya itu tergantung dari jumlah penelitian. Jadi, kalau misalnya bisa kemudian di depannya, ke depannya, bahwa penelitian ini memang diperbanyak anggarannya. Supaya para dosen kita bisa lebih berproduksi dan yang kedua, pelaporannya juga lebih disederhanakan. Kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada para dosen kita untuk bisa melakukan penelitian yang nantinya akan berguna bagi kemajuan Indonesia yang kita cintai.

Demikian dari saya. Terima kasih.

*Bilahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik. Dari PAN cukup? Prof? Baik.

Tiga menit ya, Prof, ya.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI., M.Si.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pemimpin yang saya hormati,
Anggota Komisi X,
Mas Menteri, Mas Nadiem,
Beserta seluruh jajaran,**

Ada tiga atau mungkin empat, mudah-mudahan bisa saya sampaikan dalam waktu tiga menit. Yang pertama, kami sangat berharap Mas Menteri punya terobosan untuk ikut mengawasi, mengontrol, dan mengkoordinasikan anggaran 52% yang di transfer ke daerah, supaya kemudian berdampak

kepada peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Saya sangat sedih, di dapil saya sendiri, ada SD negeri kena angin topan beliung tahun 2018, sampai hari ini belum diperbaiki. Itu di tengah kota, di Gresik daerah saya. *Nah* kami sebagai anggota Komis X, itu juga menjadi tumpuan pertanyaan. Oleh karena itu, tolong cari terobosan, supaya anggaran yang cukup besar 300.000.000.000.000 lebih itu, itu juga benar-benar punya dampak yang positif untuk melakukan peningkatan kualitas sarana-prasarana dan lain-lain di daerah.

Kemudian yang kedua, kami tentu saja mendorong agar peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi profesionalitas guru kita itu terus ditingkatkan. Jumlah guru penggerak memang terus bertambah, tapi kami ingin lebih secara kualitatif bisa dilaporkan. Karena guru-guru kita rata-rata kompetensinya itu lebih bercorak behaviouristik, behaviouristik dalam artian semua siswa yang diajar itu dianggap sama. Padahal setiap sesuai itu punya keunikan, tidak bisa diajar dengan cara yang sama. Oleh karena itu, kompetensi pembelajaran diferensiasi itu harus dikedepankan. Ini tolong menjadi catatan kita, supaya kemudian pembelajaran kita ini benar-benar terjadi pembelajaran. Bukan pembelajaran seolah-olah, seolah-olah mengajar atau mengajar seolah-olah kalau guru mengajar seolah-olah, maka yang terjadi anak-anak belajar juga belajar seolah-olah, nilainya juga seolah-olah gitu loh. Saya khawatir nanti jadi sarjana juga sarjana seolah-olah, seolah-olah sarjana, karena mengajarnya kelihatannya mengajar, tapi tidak efektif. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, kami tetap meminta untuk Mas Menteri mencari terobosan, afirmasi agar guru-guru swasta yang lolos ASN PPPK dari guru-guru swasta itu bisa dikembalikan ke sekolah asal. Kemarin, kami baru menerima para pegiat pendidikan berbasis masyarakat masih mengeluh soal ini. Masih mengeluh soal ini dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Persis dari PBNU, keluhannya sama. Tolong ini cari afirmasi.

Kalau saya membaca Undang-Undang ASN itu di Pasal 1 ayat (4), itu ASN PPPK kalau diterjemahkan adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintahan. *Nah* kalau kemudian tugas pemerintahan tetapi di tempat sekolah swasta, itu kan mestinya bisa itu. Kalau kita ini punya keinginan untuk melakukan afirmasi.

Yang terakhir, kami terus terang saja di balik kegaduhan UKT kemarin, sebenarnya apabila dosen-dosen kita yang melakukan riset dan sudah dilakukan, saya menilai risetnya sudah bagus Pak, tetapi ternyata belum dapat payung politik yang bagus. Saya ingin menyebut risetnya UNAIR kemarin waktu Covid-19. Sudah menemukan yang namanya vaksin, tetapi ternyata tidak mendapat apa ya, dukungan moril, dukungan politik, supaya penelitian tentang vaksin ini bisa cepat diperoleh dan kemudian diproduksi.

Tapi malah justru diberi tugas untuk melakukan uji klinis yang cukup berat. Di uji klinis setidaknya sekurang-kurangnya 3.000 pasien. Itu lama, itu biaya mahal dan setelah dilakukan, berhasil uji klinisnya, Covid-nya sudah pergi. Selesai uji klinis, Covid-nya pergi. Jadi sebenarnya dosen kita itu cukup

kreatif. Mas Menteri, kalau dosen-dosen kita riset-risetnya kemudian merasa dibutuhkan oleh masyarakat, saya kira perguruan tinggi kita akan mendapatkan sumber pendanaan dari riset.

Terus terang saja, saya minta waktu sedikit, boleh melaporkan dari Finlandia, Mas Ketua? Kemarin saya bertemu dengan mahasiswa kita di program doktor di Finlandia. Saya tanya, dapat biaya dari mana? Apa dari pemerintah? *Nggak* dapat biaya dari pemerintah. Dari mana? Dari seorang supervisor, seorang profesor di Finlandia, dia di-*hire* sebulan 3.000, dan yang di-*hire* 3.000 Euro ini tidak hanya dia sendiri, 10 orang dari dana riset yang diperoleh oleh supervisor itu.

Kuliahnya gratis, dia bisa hidup dengan gaji yang diperoleh dari supervisor itu. *Nah* ini mestinya juga harus menjadi inspirasi bagi kita agar pimpinan-pimpinan perguruan tinggi kita, itu juga bisa mengembangkan. Tapi ini semua tidak bisa sendiri, tapi juga harus ada perlindungan atau dukungan moral, dukungan politik dari berbagai *stakeholder* yang lain. Dan ini saya kira harus juga menjadi catatan Mas Menteri.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Wa'alaikumsalam.

PPP ada yang ingin ditambahkan, silakan. Mengingat kembali, waktu.

F-PPP (Hj. ILLIZA SAADUDDIN DJAMAL., S.E.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur pada Allah dan sholawat kepada Rasulullah.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X,
Mas Menteri, Bu Sekjen, dan seluruh jajaran,**

Yang pertama, memang kita sedang berhitung bulan Mas Menteri akan selesai, dengan segala kebersamaan. Kami tentu mengapresiasi program Beasiswa, PIP, KIP, UKT yang selama ini telah kita distribusikan, kita salurkan kepada masyarakat, dan itu mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi oleh masyarakat. Karena ini merupakan kebutuhan.

Harapan kami, ini menjadi program kegiatan yang terus berkelanjutan dengan anggaran mudah-mudahan bisa bertambah. Karena apa? Anggaran yang diberikan itu belumlah cukup, tetapi memang sudah sangat membantu dan kemudian juga bagaimana peningkatan terhadap kesejahteraan guru, dosen karena ini penting. Dengan kesejahteraan para guru dan dosen ini, tentu

akan meningkatkan kualitas dia juga di dalam mengajar.

Karena ini juga menjadi salah satu masalah yang kita tahu bahwasanya Indonesia masih termasuk negara terendah dari sisi pembiayaan pendidikan, baik untuk guru, siswa, yang kita juga mendapatkan data-data dari para pakar yang kita undang di RDP di Komisi X. Dan kemudian saya ingin menanyakan kepastian terhadap pengangkatan guru-guru P3K dari honorer ke P3K yang dijanjikan oleh pemerintah yang akan diselesaikan di tahun 2024, akhir tahun ini.

Kemudian juga kepada guru-guru swasta, memang periode ini kita belum mampu untuk bagaimana menyelesaikan persoalan guru-guru di swasta ini. Belum lagi guru-guru swasta yang diangkat menjadi PPPK itu tidak bisa lagi ditempatkan di universitas atau sekolah swasta yang ada. Karena ini akan menjadi beban cukup tinggi, terutama di Aceh. Kalau di Aceh itu kan banyak sekolah itu berbasis agama dan kemudian kualitas pendidikan swasta ini juga termasuk yang cukup baik, gitu.

Dan mereka menjadi beban ketika guru-guru yang awalnya ditempatkan di sekolah swasta ini, kemudian dipindahkan, tentu menambah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh swasta atau yayasan. *Nah* ini mungkin perlu dicarikan solusi, apa yang harus dilakukan, apakah perubahan revisi undang-undang, ataukah ada aturan yang harus dikeluarkan.

Seperti misalnya, saya berterima kasih kepada Mas Menteri, Bu Sekjen, terhadap guru-guru. Misalnya seperti Pulau Aceh, yang awalnya mereka tidak mendapatkan tunjangan khusus, disebabkan daerah itu tidak lagi termasuk daerah 3T, tapi dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri, sehingga mereka bisa mendapatkan tunjangan khusus. *Nah*, ini menjadi persoalan di banyak daerah, bukan hanya di Pulau Aceh, tentu kami meminta harusnya ada mencoba untuk dilihat. Karena kebutuhan daerah, pemerintah, kabupaten/kota itu berbeda dengan kebutuhan desa yang ada. Bisa jadi ketika BPS melakukan survei, mereka sudah dianggap mandiri. Ternyata fasilitas pendidikan yang ada di wilayah itu dan juga tunjangan yang didapatkan itu sangat-sangat kurang.

Jadi, selama ini Prof Nunuk, terima kasih banyak atas penerimaan dari daerah juga datang karena memang ini termasuk akhir dari periode ini begitu. Dan kemudian, kalau tadi mungkin Bu Anita cukup marah besar, saya cukup pahami kegalauan yang beliau hadapi sama dengan apa yang kita hadapi. Tapi juga kami mengapresiasi Bu Sekjen telah merespon itu, bahwasannya apa verifikasi oleh dinas itu sudah dihapuskan dan kita bisa kembali seperti biasa, dan mudah-mudahan ini terus bisa dijalankan begitu. Karena kami cukup sulit kalau memang harus dilakukan verifikasi.

Tetapi, memang persoalan tidak dibukanya ini semua-semua mudah-mudahan punya *political will* yang baik, sehingga masyarakat di daerah itu tidak dirugikan dengan kebijakan yang diambil. Walaupun kami paham betul apa yang menjadi rekomendasi KPK disebabkan karena ulah 1-2 orang, 1-2 hal. Kami juga meminta agar pengawasan itu juga dilakukan secara intensif kepada

penerima PIP-KIP secara reguler. Karena sebetulnya masalah di reguler ini juga cukup banyak, bukan hanya yang dimasalahkan dari persoalan yang didistribusikan melalui dana dari Anggota DPR.

Kemudian juga menyangkut tentang harapan kita 20 tahun ke depan tentang Indonesia Emas, generasi emas. PAUD Dikdasmen ini menjadi hal yang paling penting menentukan masa depan anak generasi emas kita. Bagaimana mereka harus berakhlakul karimah, bagaimana mereka harus punya budi pekerti yang baik, agar bangsa kita punya peradaban yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nah, program untuk pembangunan karakter ini bagi kami itu sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Karena memang kata Arnold T, "suatu bangsa akan mengalami kejayaan ketika hati menjadi panglima dan akan mengalami masa keemasan ketika akal pikiran dan hati disatukan dan akan mengalami kehancuran ketika akal pikiran dan nafsu menjadi panglima". *Nah*, kita tidak berharap generasi kita seperti itu. Maka, pembangunan karakter bangsa, pendidikan, secara emosional, spiritual, dan juga ilmu pengetahuan yang harus mereka miliki itu harus betul-betul *balance*.

Dan kemudian, kami juga berharap ada masukan dari anak-anak mahasiswa yang sedang magang. Mereka berharap ke depan itu bisa dibuka lebih luas lagi kesempatan kepada mereka. Karena saat ini sangat-sangat terbatas karena mereka merasa kegiatan ini suatu hal yang sangat baik bagi mereka. Bahkan dari ilmu yang berbeda mereka dapatkan dan mereka magang di DPR ini, merasa ternyata anggota DPR itu bekerja luar biasa dan *mindset* yang tadinya mereka menganggap kita ini sangat buruk kinerjanya, ternyata itu salah.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.PoI./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik.

F-PPP (Hj. ILLIZA SAADUDDIN DJAMAL., S.E.):

Baik, Kang Dede.

Terakhir, saya ingin menyampaikan guru, program guru, saya sampai lupa nih, Kang Dede. Guru penggerak ya. Jadi, bagi program guru penggerak ini bagus dan diakui kebagusannya oleh guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak dan sekarang bagaimana menggerakkan, merubah *mindset*, *open mindset* jadi kebiasaan buruk dari guru yang belum bergerak gitu, akhirnya mereka bisa juga menjadi guru penggerak gitu.

Karena ini kan masih *limited* sekali, jumlahnya sangat kecil sekali yang menjadi guru penggerak. Sementara, mereka yang belum jadi guru penggerak ini masih terbiasa dengan kebiasaan kerja yang begitu-begitu saja. Tentu ini akan terjadi gap yang cukup besar juga di sekolah itu, kalau ini tidak segera bisa disetarakan, disejajarkan, disamakan pola cara kinerja mereka. Mungkin

itu yang lain akan kita bahas nanti di RDP ke depan.

Terima kasih dan mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Selanjutnya, dari meja pimpinan. Siapa dulu? Ibu Agustin dulu. Nanti terakhir Ibu Hetifa memberikan pantun.

F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI., S.S., M.M.):

Terima kasih, Kang Dede.

Sepertinya ini sudah hampir jam 2. Kasihan Mas Menteri sudah harus meninggalkan tempat. Dan kita sebentar lagi ada Raker dengan Kemenparekraf, sehingga mungkin semuanya bisa dipercepat.

Namun, kita harus menyapa dulu teman-teman yang sedang magang nih, para mahasiswa tolong berdiri lambaikan tangan untuk Mas Menteri dan teman-teman Komisi X. Luar biasa ya, oh yang di sana juga ada. Oh ya, jadi mereka belajar menjadi Anggota DPR, mudah-mudahan nanti pada usia-usia yang cukup matang ada satu dua yang menjadi Anggota DPR RI dan masuk Komisi X.

Terima kasih.

**Mas Menteri yang saya hormati,
Beserta jajaran Pak Dede Bu Hetifah,
Dan seluruh Anggota Komisi 10 yang saya banggakan,**

Karena kita ini sedang raker untuk persiapan RDP dengan Eselon I, maka secara abstraktif saya ingin meminta pendapat dari Mas Menteri mengenai postur anggaran pendidikan tahun 2024. Sepertinya melihat di data Mas Menteri ini, pada tahun 2024, berarti tahun ini, tahun berjalan ya, 3.325,12 triliun, 20%-nya adalah 665,02 triliun. Sangat banyak. Cukup banyak.

Dan ketika mendengarkan seluruh teman-teman Komisi tadi berbicara, seolah-olah *we don't have money. Where is the money?* Kan kalau mempersepsikan biaya pendidikan, tentunya preferensinya adalah kepada anak-anak usia PAUD, sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan yang kuliah di tingkat reguler. Kalau kita melihat di sini kan banyak sekali, ada dari kementerian lain, ada yang sampai hari ini, selama hampir lima tahun yang tidak saya pahami adalah anggaran penitikan melalui transfer daerah dan dana desa.

Yang A itu DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, termasuk diantaranya dana desa. Apakah teman-teman ini *nggak* punya kenalan atau tim sukses lurah? Ya pasti tahu. Sehingga paham, ke mana perginya dana desa, berapa persen yang digunakan untuk pendidikan. Maka sangat aneh bagi kami ketika pemerintah itu membuat pengakuan. 212.000.000.000.000 sendiri untuk tahun 2024 ini dari 665.000.000.000.000. itu 52%. Mengerikan kan?

Saya kira itu adalah titik masalah mengapa pembiayaan dari Kemendikbud untuk PAUD, SD, SMP, SMK, kemudian yang sekolah negeri terutama, perguruan tinggi negeri, dan berbagai macam tunjangan untuk dosen, guru dan lain-lain itu tidak bisa rileks. Semuanya sangat terbatas, dibatasi. Ada yang pembiayaannya dari kementerian, ada yang mungkin kalau dari PTNBH ya dari perguruan tinggi itu sendiri, namun ada juga yang dari Kementerian Keuangan langsung.

Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa berapa sih sebenarnya tambahan anggaran yang di Kementerian Keuangan yang bisa diakses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun-tahun sebelumnya? Apakah masih ada harapan untuk tahun ini dari anggaran tahun 2024 itu bertambah? Kemudian apakah masih ada harapan lagi untuk tahun 2025? Yang kita lihat *plotting* anggarannya dari Kementerian Keuangan turun drastis, karena ini semakin memprihatinkan.

Bagi kami ada tiga hal mendasar. Untuk siswa reguler ini, yang penting, hal minimal untuk proses mereka belajar, terutama adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kalau yang mampu pasti sudah pergi ke swasta semuanya, karena mutu pendidikannya oke, fasilitas oke, gurunya juga pasti *fun*. Ini kita berpikir maksimalnya adalah bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke swasta.

Yang pertama adalah tentu kita berpikir tentang guru. Kalau gurunya *nggak* sejahtera ya repot, apalagi gurunya berpindah-pindah. Guru sudah mendaftar menjadi ASN, dapat, tapi habis itu harus pindah, harus ke tempat yang jauh. Mungkin tadi ada Pak Zainuddin Maliki dan Bu Illiza yang mengatakan guru ASN apakah tidak bisa diafirmasi ditugaskan.

Saya ingat pernah kita melakukan panja guru honorer ada dua kali yang mana saya kurang ingat betul. Tetapi ada hadir dari Kementerian Agama yang menyatakan bahwa beberapa guru ASN itu ditugaskan ke sekolah-sekolah swasta. Mungkin teman-teman dari Kemendikbud bisa mencari tahu bagaimana caranya itu walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak.

Kemudian yang kedua, selain guru, adalah sarana-prasarana. Perpres kita mengamanatkan sarana-prasarananya sekolah, SD, SMP, SMK, negeri yang rusak atau mau dibangun atau dikembangkan itu harus berada atau ditangani oleh Kementerian PUPR. Namun demikian, bukan berarti bahwa Kemendikbud lalu karena tidak di anggaran saya, maka saya *nggak* mikir, saya yakin tidak begitu. Pastilah punya data yang kami harapkan untuk bisa dijawab secara tertulis. Berapa sih jumlah sekolah yang rusak ringan, rusak berat,

mungkin potensi rusak dan berapa setiap tahunnya diperbaiki selama Mas Menteri ini menjabat sebagai Kemendikbud. Mungkin tahun 2020, ada berapa yang diajukan, berapa yang direalisasi. Karena menurut teman-teman di Komisi V, pengajuannya adalah dari Kemendikbud. Berapa yang diajukan tahun 2021, berapa yang direalisasi. Begitu sekolah yang rusak ringan tidak diperbaiki, maka tahun-tahun berikutnya dia akan masuk dalam kategori rusak berat.

Yang ketiga, tentunya adalah kurikulum. Kalau yang ketiga ini menurut saya sudah ada sebuah perbaikan, hanya belum masif. Niatnya Mas Menteri untuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sudah direspons lumayan baik, tetapi belum semua. Tadi Prof Zainuddin Maliki mengatakan baru saja dari Finlandia, betul. Kami dari Finlandia menemukan sebagai negara yang paling bahagia sedunia. Iya, dengan sistem pendidikan yang sangat maju.

Sehingga kalau diingat-ingat, dulu ada Nokia. Nokia "Connecting People", yang kemudian membuat handphone itu menjadi murah dan berkompetisi, sehingga sekarang bisa berada di tangan Bapak-Ibu dengan harga yang sangat terjangkau, variatif, dan memang "Connecting People". Sekarang mereka sedang menyiapkan komputer quantum. Itu adalah hasil dari sebuah pendidikan yang luar biasa.

Satu daripada anak-anak mahasiswa itu menjadi pendamping saya dan Bu Hetifa dan teman-teman. Mereka mengatakan tidak ada kelas sosial di sana. Semua orang bersekolah di sekolah yang sama. *No private school*, tidak ada sekolah swasta. Semua gratis dan dibiayai, setiap anak memiliki kesempatan yang sama. Bahkan dia sebagai WNI mendapatkan beasiswa, dia diberi tunjangan. Dia juga memiliki kesempatan untuk membuat pinjaman. Nanti kalau sudah bekerja, boleh dikembalikan. Yang menakjubkan adalah bahwa jika sekolahnya tepat waktu, maka pinjamannya dipotong 40%. Wow! Tapi itu membuktikan bahwa semua data terkoneksi.

Saya berharap suatu hari Indonesia akan menjadi seperti itu. Namun, tentu itu harus dimulai, dan saya kira Merdeka Belajar, Kampus Merdeka sudah dimulai, kemerdekaan berpikir sudah dimulai. Mari kita meneruskan dengan proses pelayanan di kementerian dan seluruh jajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk mendorong itu menjadi kenyataan.

Yang kedua, ini titipannya bos saya, jadi saya harus menyampaikan kepada Dirjen Vokasi. Dua Poltekpar membutuhkan segera persetujuan untuk bisa menerima siswa Bu, Solo Raya, dan Manado. Ini harus saya sampaikan. Mengapa? Karena sudah banyak permintaan dan pemerintah daerah sudah memfasilitasi untuk pembukaan kelas baru, tetapi izin dari Kementerian belum turun.

Saya kira itu hal yang ingin saya sampaikan, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat dan sukses selalu, amin.

Terima kasih, saya kembalikan waktunya Pak Dede.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Terima kasih Ibu Agustina, 15 menit.

Tapi benar Mas Menteri, kemarin kita dari Finland memang. Kita lihat ada kemiripan antara program-program yang dilakukan di sana dengan Merdeka Belajar. Masalah terbesar adalah implementasi dan koordinasi, ini yang jadi PR kita bersama.

Saya pikir Merdeka Belajar ini perlu kita jaga, kita kawal. Tetapi masalah implementasi dan masalah koordinasi tadi kepada berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, termasuk kalau kata Ibu Anita tadi, dinas-dinas ini harus kita perkuat nanti. Mungkin, kunker lagi.

Silakan Ibu Hetifah, terakhir.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI., M.Si.):

Ibu Hetifah, izin sebelum Ibu Hetifah menyampaikan boleh *nggak*? Ada satu yang penting, lupa tadi.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Ini, Pak, waktunya, Pak. Karena sudah mepet.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI., M.Si.):

Satu menit.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Kita minta jawaban, kasihan Ibu Hetifah sudah mempersiapkan video dari tadi.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI., M.Si.):

Satu menit saja, satu menit.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Habis dari Ibu Hetifah saja, ya.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI., M.Si.):

Habis dari Bu Hetifah, boleh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Boleh, ya.

F-GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN., MPP.):

Terima kasih.

Kang Dede dan pimpinan Komisi X yang hadir Ibu Agustina, Mas Menteri dan jajaran,

Tadi melanjutkan Kang Dede terkait dengan Merdeka Belajar, jadi harus dikawal ya Kang Dede ya. Kalau begitu saya sampaikan pantun ini.

“Sarapan pagi pakai cah kangkung,
Masak sendiri tak perlu ke mall,
Semangat merdeka belajar terus kita dukung,
Pasti lancar jika sinerginya maksimal”.

Jadi, saya yakin hal-hal yang baik, transformasi, inovasi yang sudah diinisiasi pada periode atau di era Mas Nadiem ini yang terbukti baik tentunya harus berlanjut dan jika ada kekurangan-kekurangan kita bisa benahi. *Nah*, letakkan basis kebijakan lima tahun ke depan di anggaran 2025 ini. Kita punya waktu cukup nanti untuk membedah dan melakukan pendalaman pada RDP mendatang.

Dan untuk itu kita tegaskan, kami membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan. Ini lho, Ketuanya *nukasep iye tah* di sebelah saya. Mudah-mudahan Panja itu ya Kang Dede, bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tajam dan tepat, dan juga yang sifatnya strategis. Bukan hanya untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, tapi juga untuk kementerian-kementerian lainnya itu harapan kami.

Dan tentu saja, kembali kami berharap sinergi yang baik yang sudah kita lakukan selama ini dilanjutkan. *Nah* mudah-mudahan RDP kita berjalan lancar ya, Ibu Sekjen.

“Di jalan mobil berjalan pelan,
Semakin laju untuk melesat,
Anggaran pendidikan harus kita tingkatkan,
Agar siswa dan guru semakin hebat”.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih Ibu Hetifah. Dua setengah menit tadi.

Pak Prof mungkin bisa menimpali pantun barusan.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI., M.Si.):

Ya saya ingin menyampaikan pertemuan kami dengan PPI, PPI Finlandia, Persatuan Pelajar Indonesia yang di Finlandia. Ya, saya dengan Prof. Djohar yang sempat menemui mereka. Ada satu keluhan yang saya kira penting untuk kami sampaikan kepada Mas Menteri, biaya LPDP yang dia peroleh itu 1.200 Euro, yang 900 untuk sewa apartemen.

Jadi, dia hidup tinggal dengan uang 300 Euro, dia dengan segala cara harus bisa *survive*. Pak Hamid saya kira kemarin juga ikut mendengarkan, Pak. *Nah* ini saya kira perlu nanti bagaimana dipikirkan agar angka ini bisa dinaikkan, karena hanya dengan 1.200.

Terima kasih, Kang Dede.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KOMISI X DPR RI):

Baik, terima kasih.

Teman-teman, saya berikan kesempatan 10 menit, Mas Menteri, mungkin untuk bisa menjawab paparan anggota.

Saya persilakan, Mas Menteri.

MENDIKBUDRISTEK (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.B., M.B.A):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Terima kasih, Ibu Bapak, Anggota Komisi X, untuk berbagai masukannya. Tadi saya mencatat beberapa poin dan sepertinya mayoritas adalah masukan yang berhubungan dengan anggaran kami di tahun 2025. Seperti yang disebut tadi sama Kang Dede, kita akan melalui pendalaman ya Pak lewat RDP. Di mana semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa dijawab secara mendetail, didiskusikan dan juga bisa membuat beberapa keputusan.

Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu per satu jawabannya, tentunya baik secara tertulis ataupun RDP saya akan pasti kami *address* setiap isu yang diangkat.

Sekali lagi mungkin demikian dari kami, terima kasih.

Saya kembalikan ke meja Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.):

Baik terima kasih, jadi kawan-kawan yang kami hormati.

Memang beliau ini sangat memperhatikan. Ada menteri berikutnya yang akan dapat dengan kita sehingga nanti akan dilakukan pendalaman di dalam RDP 2 hari 2 malam. Belum, nanti ditentukan. Di situ nanti Ibu Anita bisa mengeluarkan semua pikiran-pikirannya.

Untuk itu, saya minta bantuan Ibu Agustina untuk membacakan kesimpulan, sementara saya pamit duluan karena mengejar tiket pesawat, Pak.

Terima kasih.

F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI., S.S., M.M.):

Siap, Pak Dede.

Sepertinya Mas Menteri juga harus mengajar tiket pesawat, jadi kita bikin cepat saja ya.

Laporan singkat, pendahuluan tidak saya baca, tapi ini di Pimpin oleh Bapak Dr. Dede Yusuf.

Kesimpulan yang pertama, berdasarkan surat Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kemendikbud mendapatkan alokasi pagu indikatif belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp83.187.821.056.000. Dengan rincian, mohon pencermatannya, Bu Sekjen, mudah-mudahan tidak ada yang keliru. Kemudian per unit program, mudah-mudahan juga tidak ada yang keliru. Sampai halaman berikutnya, ya terus-terus ya sampai dukungan manajemen 2,504 sekian miliar, ya.

Kemudian yang kedua Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman terhadap usulan tambahan sebesar Rp25.013.159.081.000 dan mengharapkan Kemendikbudristek untuk memberikan penjelasan dan data lebih rinci terhadap usulan tambahan tersebut.

Yang ketiga, Komisi X akan melakukan pendalaman terhadap RKA dan RKP K/L pada tahun anggaran untuk RAPBN tahun anggaran 2025 dengan catatan. Yang pertama, Kemendikbudristek RI menyampaikan RKA-RKP bidang pendidikan dan kebudayaan tahun anggaran 2025 beserta evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran sebelumnya, dari tahun 2022 sampai

dengan tahun 2024, tahun berjalan termasuk data PNBP.

Yang B, Kemendikbudristek RI menyajikan data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2025. Yang C, setiap Eselon I Kemendikbudristek RI menyajikan perubahan atau penghapusan program atau kegiatan yang sebelumnya ada di tahun anggaran 2024 dan program kegiatan baru di tahun 2025.

D. Proses pembahasan RKA K/L, dan RKP tahun anggaran 2025 agar menekankan bahwa program prioritas nasional dan program wajib belajar 12 tahun tidak terganggu.

Kesimpulan yang keempat, pendalaman materi rancangan RKA K/L, dan RKP tahun anggaran 2025 dengan eselon I Kemendikbudristek RI akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Apakah ada tambahan, Ibu, cukup? Teman-teman Komisi, Bu Hetifah, cukup?

Jika cukup, maka dengan berakhirnya penyampaian laporan singkat Komisi X Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, maka dengan ini saya nyatakan rapat kerja dengan Kemendikbudristek RI dinyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.15 WIB)

a.n **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

ttd.

DADANG PRAYITNA,S.IP,MH
NIP. 196708061990031003